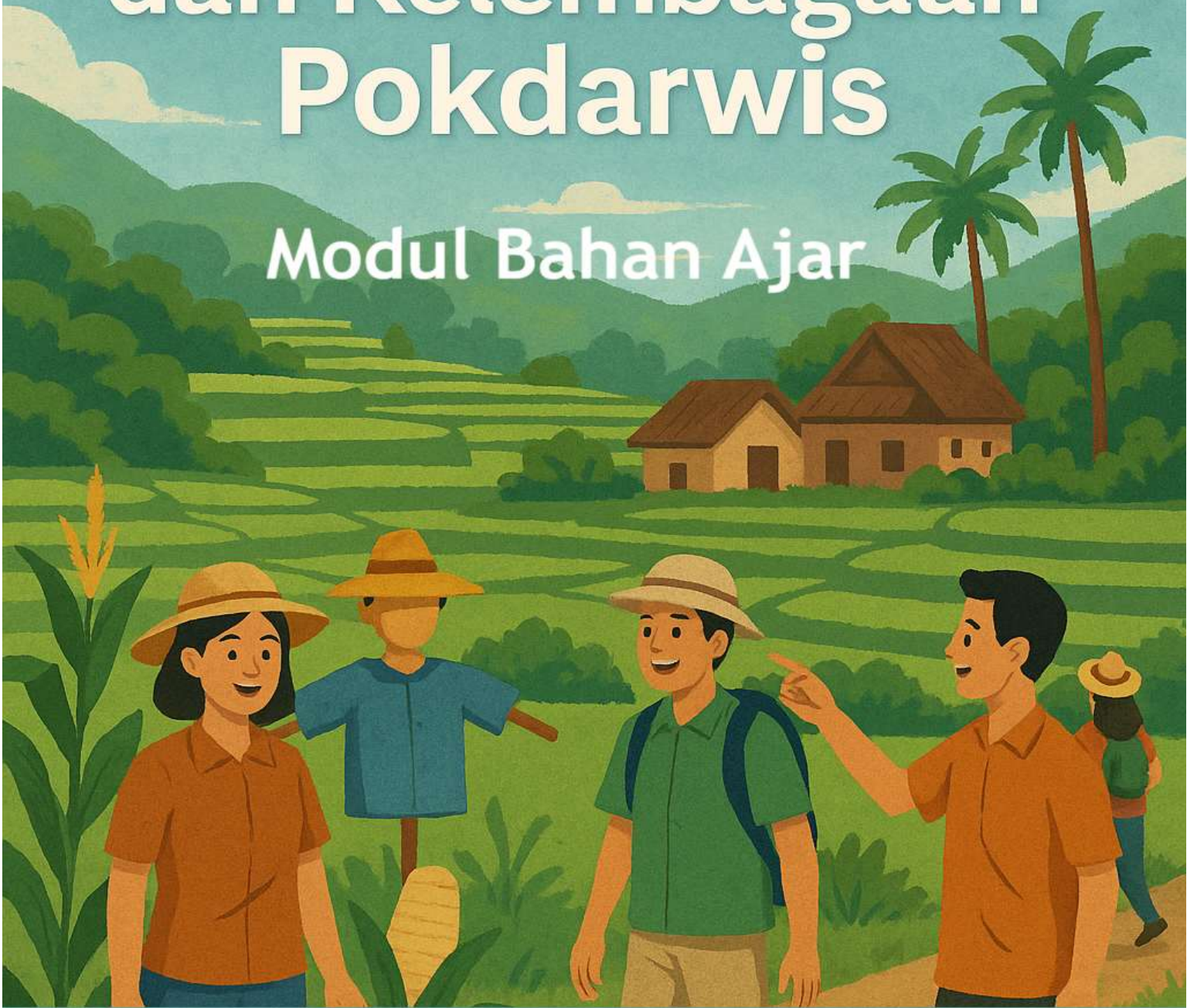


Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Pokdarwis

Modul Bahan Ajar



Disusun oleh: Dr. Anwar Rahman, S.Pd., M.Pd.
Ali MUrtopo, S.Pd., M.A.
Sutarni, S.P., M.E.P.

Halaman Hak Cipta

Judul: Modul Pelatihan: Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

Penyusun:

Dr. Anwar Rahman, S.Pd., M.Pd.

Ali Murtopo, S.Pd., M.A.

Sutarni, S.P., M.E.P.

Diterbitkan oleh:

Politeknik Negeri Lampung

Jl. Soekarno-Hatta No. 10, Rajabasa, Bandar Lampung

Telp. (0721) 703995 – Fax. (0721) 787309

Website: www.polinela.ac.id

Tahun Terbit: 2025

ISBN: (dalam proses pengajuan)

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak, memindahkan, atau menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman, maupun media lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit atau penyusun.

Segala bentuk kutipan yang digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, atau kegiatan akademik diperbolehkan sepanjang menyebutkan sumber secara benar dan tidak untuk kepentingan komersial.

Buku bahan ajar ini disusun dengan bantuan **Artificial Intelligence (AI)** sebagai *co-authoring tool* untuk memperkuat penyusunan konten berbasis literatur ilmiah nasional dan internasional, serta dikembangkan melalui pendekatan akademik yang memadukan **hasil riset, praktik kelembagaan Pokdarwis, dan prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)**.

Seluruh data, analisis, dan referensi yang tercantum telah diverifikasi dari sumber ilmiah seperti **jurnal SINTA 1–3, jurnal internasional bereputasi (open access), serta regulasi resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI)**.

Isi dan pandangan dalam buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyusun, bukan mencerminkan kebijakan resmi institusi penerbit.

Dicetak di Indonesia

Edisi Pertama, Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan “Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)” ini dengan baik. Modul ini disusun sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, khususnya bagi anggota Pokdarwis, aparat desa, mahasiswa, serta praktisi pariwisata yang terlibat dalam pembangunan desa wisata berkelanjutan.

Penyusunan modul ini dilakukan melalui pendekatan akademik yang mengintegrasikan hasil kajian teoritis dan empiris dari berbagai sumber ilmiah. Proses pengembangan modul turut memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu akademik dalam penelusuran referensi, analisis literatur, serta pengembangan argumentasi berbasis data dan penelitian terkini. Penggunaan AI dalam konteks ini diarahkan untuk memperkuat kualitas substansi ilmiah dan efektivitas penyusunan, dengan tetap mengedepankan validitas akademik dan integritas keilmuan.

Modul ini dikembangkan berdasarkan telaah terhadap berbagai jurnal penelitian nasional terakreditasi (SINTA 1, 2, dan 3) serta jurnal internasional bereputasi yang dapat diakses secara terbuka (open access). Referensi tersebut digunakan untuk memastikan setiap konsep, teori, dan praktik manajemen kelembagaan Pokdarwis yang dibahas memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan dengan konteks lokal, serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Selain pembahasan teoritis, modul ini dilengkapi dengan studi kasus empiris, simulasi praktik, dan latihan penyusunan program kerja yang dirancang untuk memperkuat kemampuan analitis dan aplikatif peserta. Dengan demikian, modul ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang komprehensif, tidak hanya bagi kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan penelitian, kebijakan, dan inovasi kelembagaan Pokdarwis di tingkat daerah maupun nasional.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, termasuk lembaga pendidikan tinggi, dinas pariwisata, dan mitra desa wisata yang telah memberikan dukungan data dan informasi lapangan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan menjadi kontribusi ilmiah dalam upaya mewujudkan pariwisata Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Bandar Lampung, Oktober 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I – PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Pelatihan	5
1.3 Sasaran dan Peserta.....	5
1.4 Metode dan Strategi Pembelajaran	6
1.5 Luaran dan Manfaat Modul	6
1.6 Kerangka Konseptual Modul	7
1.7 Sistematika Penulisan Modul.....	7
BAB II – DASAR PEMBENTUKAN DAN PERAN POKDARWIS	8
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pokdarwis	8
2.2 Tujuan Pembentukan Pokdarwis.....	11
2.3 Fungsi dan Tugas Pokdarwis	12
2.4 Struktur Organisasi Pokdarwis	13
2.5 Hubungan Pokdarwis dengan Lembaga Pemerintah dan Masyarakat	14
BAB III – Konsep Dasar Manajemen Organisasi.....	16
3.1 Pengertian Manajemen.....	16
3.2 Fungsi-fungsi Manajemen: Planning, Organizing, Actuating, Controlling	16
3.2.1 Planning (Perencanaan)	16
3.2.2 Organizing (Pengorganisasian).....	17
3.2.3 Actuating (Pelaksanaan)	17
3.2.4 Controlling (Pengendalian).....	17
3.3 Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	18
3.4 Manajemen Berbasis Partisipasi Masyarakat.....	18
3.5 Good Governance dalam Kelembagaan Desa Wisata	19
Ringkasan dan Penutup.....	20
BAB IV – STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN POKDARWIS.....	21
4.1 Bentuk dan Jenis Kelembagaan Pokdarwis	21

4.2 Analisis Kebutuhan Organisasi.....	21
4.3 Desain Struktur Organisasi yang Ideal	22
4.4 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Anggota.....	23
4.5 Mekanisme Kerja dan Koordinasi Internal	24
4.6 Studi Kasus: Kelembagaan Pokdarwis Sukses di Indonesia.....	25
Penutup	26
Referensi	26
BAB V – KEPEMIMPINAN DAN DINAMIKA KELOMPOK	27
5.1 Konsep Kepemimpinan dalam Organisasi Masyarakat	27
5.2 Gaya Kepemimpinan yang Efektif bagi Pokdarwis.....	28
5.3 Dinamika Kelompok dan Konflik Internal	29
5.4 Teknik Fasilitasi dan Pengambilan Keputusan	30
5.5 Komunikasi Efektif dalam Organisasi Pokdarwis	31
Penutup	32
Referensi	32
BAB VI – PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KERJA	34
6.1 Menyusun Rencana Kerja (Workplan) Pokdarwis	34
6.2 Analisis SWOT dan Perencanaan Strategis	35
6.3 Penetapan Prioritas Program.....	35
6.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	36
6.5 Monitoring dan Evaluasi Kinerja.....	37
Penutup	38
Referensi Pilihan.....	38
BAB VII – ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ORGANISASI.....	40
7.1 Prinsip Administrasi Organisasi	40
7.2 Pencatatan dan Dokumentasi Kegiatan.....	41
7.3 Manajemen Keuangan Sederhana.....	42
7.4 Transparansi dan Akuntabilitas.....	43
7.5 Pelaporan Kegiatan Pokdarwis	43
Penutup	44
BAB VIII – PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN	46
8.1 Pentingnya Networking bagi Pokdarwis.....	46

8.2 Strategi Menjalin Kemitraan (Pemerintah, Swasta, Akademisi, Komunitas).....	47
8.3 Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Industri Pariwisata	48
8.4 Penyusunan MoU dan Kesepakatan Kerjasama	49
8.5 Contoh Kasus: Pokdarwis Berjejaring dengan Dunia Usaha.....	50
Penutup	51
Referensi	51
BAB IX – PEMBERDAYAAN ANGGOTA DAN PELATIHAN BERKELANJUTAN.....	52
9.1 Peningkatan Kapasitas SDM.....	52
9.2 Strategi Penguatan Kompetensi dan Motivasi Anggota	52
9.3 Sistem Regenerasi Kepengurusan.....	53
9.4 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pokdarwis	54
9.5 Model Pembelajaran Partisipatif di Masyarakat	55
Penutup	56
Referensi Pilihan.....	56
BAB X – POKDARWIS DALAM PERSPEKTIF PARIWISATA BERKELANJUTAN	57
10.1 Konsep Pariwisata Berkelanjutan dan Community-Based Tourism.....	57
10.2 Peran Pokdarwis dalam Pelestarian Alam dan Budaya	57
10.3 Praktik Terbaik (Best Practices) Desa Wisata di Indonesia.....	58
10.4 Inovasi Digital dan Pemasaran Berbasis Komunitas	59
10.5 Rencana Aksi Keberlanjutan Pokdarwis.....	59
Penutup	60
Referensi	61
LAMPIRAN.....	62
1. Formulir Rencana Kerja Pokdarwis.....	62
2. Contoh SK Pembentukan Pokdarwis	63
3. Template Laporan Kegiatan.....	64
4. Template Notulen Rapat	65
5. Daftar Pustaka (Referensi Buku, Jurnal, dan Regulasi Kemenparekraf).....	66
A. Buku dan Regulasi	66
B. Jurnal Nasional (SINTA 1–3)	66
C. Jurnal Internasional	67
D. Website Referensi	67

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi nasional yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas dan kebanggaan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai budaya serta lingkungan.

Salah satu pilar penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan wadah bagi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi wisata di wilayahnya. Keberadaan Pokdarwis diakui dan diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak Pokdarwis yang menghadapi berbagai kendala dalam aspek kelembagaan dan manajemen organisasi. Permasalahan tersebut antara lain: lemahnya struktur organisasi, kurangnya koordinasi antaranggota, minimnya kemampuan dalam penyusunan rencana kerja, dan belum optimalnya pengelolaan administrasi serta keuangan. Akibatnya, banyak program yang tidak berkelanjutan dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Pokdarwis agar mampu berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak pengembangan desa wisata. Melalui pelatihan ini, diharapkan anggota Pokdarwis dapat memahami prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi, struktur kelembagaan, serta strategi pengelolaan yang efektif dan transparan.

Modul ini disusun sebagai panduan praktis sekaligus referensi akademik dalam pelatihan “Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Pokdarwis”, dengan pendekatan yang aplikatif,

partisipatif, dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat desa wisata di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

1.2 Tujuan Pelatihan

Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pokdarwis dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan. Secara khusus, tujuan pelatihan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman tentang konsep dasar kelembagaan dan peran Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
2. Melatih kemampuan peserta dalam menyusun struktur organisasi Pokdarwis yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja Pokdarwis.
4. Mengembangkan kemampuan administrasi, keuangan, dan pelaporan kegiatan secara transparan dan akuntabel.
5. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan, semangat kebersamaan, dan partisipasi aktif anggota dalam mencapai tujuan bersama.

1.3 Sasaran dan Peserta

Sasaran utama modul ini adalah anggota Pokdarwis di tingkat desa atau kelurahan, pengelola desa wisata, perangkat desa, serta pihak lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Peserta pelatihan diharapkan memiliki latar belakang yang beragam, baik dari unsur pengurus Pokdarwis, Karang Taruna, pelaku UMKM pariwisata, maupun tokoh masyarakat. Dengan demikian, pelatihan ini bersifat inklusif, memberi ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi pariwisata daerahnya.

1.4 Metode dan Strategi Pembelajaran

Modul ini menggunakan pendekatan andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan menekankan pada keterlibatan aktif peserta. Metode yang digunakan antara lain:

1. Ceramah Interaktif – penyampaian materi disertai tanya jawab agar peserta memahami konsep dasar.
2. Diskusi Kelompok – peserta dilatih untuk berpikir kritis dan kolaboratif dalam menyelesaikan studi kasus nyata.
3. Simulasi dan Praktik Lapangan – peserta diajak langsung menerapkan konsep manajemen organisasi dalam situasi nyata.
4. Studi Kasus – pembelajaran dari pengalaman Pokdarwis yang telah sukses di berbagai daerah.
5. Evaluasi dan Refleksi – peserta melakukan evaluasi diri dan kelompok untuk menilai capaian pembelajaran.

Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan keterampilan manajerial di lapangan.

1.5 Luaran dan Manfaat Modul

Setelah mengikuti pelatihan berbasis modul ini, peserta diharapkan:

1. Mampu menyusun dan memahami struktur organisasi Pokdarwis secara sistematis.
2. Mampu membuat rencana kerja tahunan dan strategi pelaksanaan program yang realistis.
3. Memiliki kemampuan administrasi dan pencatatan keuangan yang transparan.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dalam organisasi Pokdarwis.
5. Memiliki jejaring dan kemitraan yang lebih luas dengan pihak eksternal (pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas).
6. Secara umum, modul ini diharapkan memberikan manfaat nyata dalam penguatan kelembagaan Pokdarwis agar lebih profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

1.6 Kerangka Konseptual Modul

Kerangka konseptual dalam modul ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa keberhasilan Pokdarwis sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi. Pokdarwis yang kuat tidak hanya memiliki struktur organisasi yang rapi, tetapi juga budaya kerja yang kolaboratif, transparan, dan inovatif.

Secara sederhana, hubungan antar komponen manajemen kelembagaan Pokdarwis dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM) → Struktur dan Fungsi Organisasi → Perencanaan dan Pelaksanaan Program → Evaluasi dan Akuntabilitas → Keberlanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan demikian, modul ini tidak hanya membahas teori manajemen, tetapi juga menuntun peserta untuk memahami bagaimana Pokdarwis menjadi agen perubahan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

1.7 Sistematika Penulisan Modul

Agar pembaca dan peserta pelatihan dapat mengikuti alur pembelajaran dengan mudah, modul ini disusun dalam 12 bab dengan struktur sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Dasar Pembentukan dan Peran Pokdarwis

Bab III : Konsep Dasar Manajemen Organisasi

Bab IV : Struktur dan Kelembagaan Pokdarwis

Bab V : Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok

Bab VI : Perencanaan dan Pengelolaan Program Kerja

Bab VII : Administrasi dan Keuangan Organisasi

Bab VIII : Pengembangan Jejaring dan Kemitraan

Bab IX : Pemberdayaan Anggota dan Pelatihan Berkelanjutan

Bab X : Pokdarwis dalam Perspektif Pariwisata Berkelanjutan

Bab XI : Studi Kasus dan Latihan Praktik

Bab XII : Penutup

Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, materi pokok, latihan atau refleksi, dan studi kasus, sehingga dapat digunakan secara fleksibel dalam kegiatan pelatihan, lokakarya, maupun pembelajaran mandiri di masyarakat.

BAB II – DASAR PEMBENTUKAN DAN PERAN POKDARWIS

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pokdarwis

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, keberadaan Pokdarwis — Kelompok Sadar Wisata — menjadi sangat krusial sebagai jembatan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Secara konseptual, Pokdarwis adalah suatu kelembagaan masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan dan masyarakat di sekitar destinasi, yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pengembangan destinasi wisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas wisata. Sebagai contoh, dalam “Pedoman Kelompok Sadar Wisata” disebutkan:

“Kelompok Sadar Wisata, selanjutnya disebut dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.” (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, 2012)

Pengertian ini menegaskan dua aspek utama: (1) Pokdarwis mempunyai karakter masyarakat (bersifat swadaya/partisipasi), dan (2) Pokdarwis berfungsi sebagai penggerak atau motor sosial di wilayah destinasi wisata, bukan sebagai entitas top-down semata. Potensi besar Pokdarwis terletak pada kemampuan untuk memobilisasi masyarakat sebagai “tuan rumah” sekaligus pelaku dalam pengembangan wisata, yang selaras dengan paradigma partisipasi dan pembangunan berbasis komunitas (community-based tourism).

Dasar Hukum

Keberadaan Pokdarwis juga diperkuat oleh kerangka regulasi kepariwisataan dan pengembangan destinasi di Indonesia. Sebagai landasan hukum, beberapa regulasi penting antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10/2009) yang menetapkan bahwa kepariwisataan adalah segala aktifitas wisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin serta menjadi salah satu sektor pembangunan yang harus ditunjang oleh masyarakat dan lingkungan. Dalam UU ini secara implisit menempatkan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan yang harus diberdayakan dan dilibatkan secara aktif.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata yang secara eksplisit mengatur tentang konsep “sadar wisata” sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran dan partisipasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan kepariwisataan.
3. Selain itu, regulasi turunannya seperti Pedoman Pokdarwis (Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Pokdarwis, 2012) menyebutkan beberapa dasar hukum tambahan seperti: Instruksi Presiden, peraturan menteri lainnya, serta peraturan daerah yang mendukung pengembangan pariwisata lokal.

Deretan regulasi ini menunjukkan bahwa Pokdarwis bukan sekadar inisiatif lokal semata, melainkan memiliki legitimasi regulatif yang memungkinkan keterlibatan pemerintah, pembinaan kelembagaan, penetapan struktur organisasi, dan monitoring partisipasi masyarakat.

Kaitannya dengan Konsep Pembentukan Kelembagaan

Pemahaman atas dasar hukum dan pengertian Pokdarwis sangat penting karena:

1. Memastikan legalitas — Pokdarwis yang dibentuk dan beroperasi berdasarkan pedoman regulasi memiliki landasan yang sah untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan pelaku usaha pariwisata.
2. Menunjukkan arah fungsi dan peran — Dasar hukum mengarahkan bahwa Pokdarwis bukan hanya “kelompok informal”, melainkan memiliki tugas untuk mendukung

penciptaan lingkungan wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan (unsur Sapta Pesona) sebagaimana diatur dalam pedoman.

3. Membuka ruang pembinaan, fasilitasi dan kemitraan — Dengan landasan regulasi yang jelas, pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat membina Pokdarwis, memberikan fasilitasi, pelatihan, alokasi dana, serta pengakuan formal melalui SK atau keputusan pengukuhan.

Implementasi di Lapangan

Dalam praktiknya, banyak Pokdarwis yang dibentuk melalui inisiatif masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan maupun dinas pariwisata. Sebagai contoh, sebuah studi menyebutkan bahwa Pokdarwis di Desa Tjimanoeck didirikan dengan dukungan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan taman eduwisata, berdasarkan pedoman dan regulasi yang berlaku.

Tantangan yang muncul antara lain: belum semua Pokdarwis memiliki struktur organisasi yang jelas, AD/ART formal, maupun pengakuan resmi dari instansi terkait. Hal ini menegaskan pentingnya memahami dan mematuhi kerangka hukum pembentukan, agar Pokdarwis memiliki legitimasi internal dan eksternal, serta memperoleh akses ke berbagai program pembinaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Maulida Yuliana dalam risetnya: “Dasar hukum yang menjadi payung dalam penyusunan kelompok sadar wisata adalah ... Undang-Undang No.10/2009” (Maulida Yuliana, 2020)

Sinergi Pengertian dan Dasar Hukum dalam Modul

Dengan demikian, dalam modul ini kita mengadopsi definisi Pokdarwis yang menekankan pembentukan kelembagaan masyarakat aktif dalam pengembangan pariwisata, dan menyertakan landasan hukum sebagai pijakan operasional dan tata kelola. Modul ini akan memperkuat pemahaman peserta bahwa Pokdarwis bukan hanya wadah kebersamaan, tetapi juga organisasi yang harus memiliki legitimasi, struktur, fungsi dan tanggung jawab sesuai regulasi kepariwisataan nasional dan lokal.

Lebih lanjut, peserta akan diajak mengidentifikasi regulasi lokal (peraturan daerah, keputusan bupati/walikota) yang berlaku di wilayah mereka, sebagai bagian dari penyesuaian modul ke konteks Desa Wisata Poncowati yang Anda bina. Dengan demikian, bab ini mengakhiri dengan

tugas refleksi: “Identifikasi regulasi lokal yang mengatur keberadaan Pokdarwis di kabupaten-kota Anda, dan uraikan status legal Pokdarwis di desa/kelurahan Anda.”

2.2 Tujuan Pembentukan Pokdarwis

Pokdarwis dibentuk dengan tujuan utama untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata untuk menjaga, memanfaatkan, serta mengembangkan potensi wisata yang dimiliki daerah secara berkelanjutan.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012), Pokdarwis memiliki tiga tujuan utama:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata dan potensi wisata lokal.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim pariwisata yang kondusif melalui penerapan nilai-nilai Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan).
3. Mendorong terwujudnya manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Dengan demikian, pembentukan Pokdarwis bukan sekadar pembentukan organisasi formal, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan berbasis masyarakat (*community-based tourism development*).

Hasil penelitian Suryani dan Hendrayana (2020) menunjukkan bahwa kehadiran Pokdarwis dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata dan menumbuhkan inisiatif lokal dalam menciptakan produk wisata unggulan. Di Desa Wisata Nglanggeran, misalnya, penguatan peran Pokdarwis telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat hingga 30% melalui kegiatan wisata alam dan edukasi pertanian.

Lebih jauh, tujuan pembentukan Pokdarwis juga terkait dengan implementasi *good governance* di sektor pariwisata, yaitu menciptakan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Oleh karena itu, keberadaan Pokdarwis menjadi cerminan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan pilar ketiga pembangunan pariwisata berkelanjutan (*people, planet, profit*).

2.3 Fungsi dan Tugas Pokdarwis

Pokdarwis memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penggerak (motivator) **dan** pelaku (aktor) dalam pembangunan kepariwisataan. Menurut *Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Kemendikbud, 2012)*, fungsi Pokdarwis dapat dijabarkan menjadi empat aspek utama:

1. Fungsi Edukasi

Pokdarwis berperan menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Sapta Pesona dan dampak positif pariwisata terhadap pembangunan daerah. Edukasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau kampanye sadar wisata.

2. Fungsi Advokasi dan Fasilitasi

Pokdarwis menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, ide, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang pariwisata.

3. Fungsi Pemberdayaan Ekonomi

Melalui pengembangan potensi lokal (kuliner, kerajinan, atraksi budaya), Pokdarwis mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Pelestarian Lingkungan dan Budaya

Pokdarwis menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Sementara itu, tugas utama Pokdarwis meliputi:

1. Mengidentifikasi potensi wisata di wilayahnya.
2. Menyusun rencana pengembangan destinasi.
3. Melaksanakan kegiatan promosi wisata berbasis komunitas.
4. Membangun jaringan dengan stakeholder pariwisata.
5. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendampingan.
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berkala.

Sebagai contoh konkret, Pokdarwis Desa Pahawang (Lampung Selatan) menjalankan tugasnya dengan mengelola wisata snorkeling berbasis konservasi terumbu karang. Mereka melibatkan

nelayan lokal sebagai pemandu wisata dan bekerja sama dengan Dinas Kelautan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Menurut Ismayanti (2019) fungsi Pokdarwis yang kuat menjadi pilar utama keberhasilan pengembangan desa wisata karena memastikan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

2.4 Struktur Organisasi Pokdarwis

Struktur organisasi Pokdarwis pada dasarnya disusun secara sederhana namun fungsional, agar mudah diterapkan oleh masyarakat desa. Kementerian Pariwisata (2012) memberikan contoh struktur dasar sebagai berikut:



Setiap bidang memiliki uraian tugas yang berbeda, namun tetap berorientasi pada satu tujuan bersama, yaitu pengembangan destinasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Pokdarwis berperan sebagai koordinator utama yang memastikan jalannya seluruh kegiatan. Sementara Sekretaris bertanggung jawab terhadap administrasi, dokumentasi, dan komunikasi internal. Bendahara mengatur keuangan organisasi secara transparan.

Menurut Handayani (2021) menyatakan bahwa keberhasilan struktur Pokdarwis ditentukan oleh pembagian tugas yang proporsional dan kemampuan setiap bidang dalam menjalankan fungsinya. Organisasi yang memiliki struktur jelas cenderung lebih efektif dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti dinas pariwisata, lembaga pendidikan, maupun pelaku industri wisata.

Selain itu, struktur organisasi Pokdarwis bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Di beberapa daerah, Pokdarwis menambahkan bidang digital marketing,

keamanan destinasi, atau pengelolaan sampah wisata sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya.

Studi oleh Kholil et al. (2023) menunjukkan bahwa pembagian peran yang jelas dalam struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pokdarwis, terutama dalam hal promosi dan pengelolaan destinasi. Dengan demikian, struktur organisasi bukan hanya simbol formalitas, tetapi juga kerangka kerja operasional yang menentukan efektivitas lembaga.

2.5 Hubungan Pokdarwis dengan Lembaga Pemerintah dan Masyarakat

Pokdarwis bukan organisasi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem kelembagaan yang lebih luas dalam ekosistem pariwisata daerah. Hubungan kelembagaan Pokdarwis melibatkan tiga pihak utama: pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

1. Hubungan dengan Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai pembina, fasilitator, dan regulator. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengukuhan Pokdarwis agar memiliki legalitas formal.

Contohnya, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung secara rutin memberikan pelatihan manajemen destinasi dan sertifikasi kompetensi bagi pengurus Pokdarwis di berbagai kabupaten.

2. Hubungan dengan Masyarakat

Pokdarwis tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi inti kekuatan kelembagaan ini. Menurut Suansri (2013), partisipasi masyarakat dalam pariwisata merupakan prasyarat utama keberlanjutan, karena masyarakatlah yang memiliki sumber daya alam, budaya, dan sosial.

3. Hubungan dengan Dunia Usaha dan Akademisi

Dunia usaha (swasta) berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha wisata, pemasaran, serta inovasi produk. Sementara perguruan tinggi dapat berperan sebagai pendamping riset, edukasi, dan inovasi teknologi pariwisata.

Kerangka hubungan ini dikenal sebagai quadruple helix model (pemerintah–masyarakat–akademisi–industri), yang memastikan pembangunan pariwisata berjalan kolaboratif dan berkelanjutan.

Penelitian Utami & Dewi (2022) menegaskan bahwa Pokdarwis yang memiliki jejaring kuat dengan berbagai lembaga eksternal cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan desa wisata, karena memperoleh dukungan sumber daya, promosi, dan inovasi teknologi.

Oleh sebab itu, penguatan jejaring dan komunikasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan Pokdarwis di era digital dan globalisasi saat ini.

Daftar Referensi

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- Suryani, A., & Hendrayana, A. (2020). Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 55–63.
- Ismayanti. (2019). *Community Based Tourism: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Handayani, N. (2021). Struktur Organisasi dan Efektivitas Pokdarwis di Desa Wisata. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Desa Wisata*, 3(1), 22–33.
- Kholil, R., Ariyani, N., Gusdini, N., & Febrina, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokdarwis untuk Menjamin Keberlanjutan Taman Tjimanoek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*, 4(2), 218–226.
- Utami, D., & Dewi, R. (2022). Kolaborasi Quadruple Helix dalam Penguatan Kelembagaan Pokdarwis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 149–158.
- Suansri, P. (2013). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).
- Firmansyah R., “Pedoman Kelompok Sadar Wisata”, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, 2012. – tersedia dalam format PDF di Scribd.
- Kholil, Nafiah Ariyani, Ninin Gusdini, Laila Febrina, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Untuk Menjamin Keberlanjutan Taman Tjimanoek sebagai Eduwisata”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)* Vol 4 No 2 Oktober 2023, hlm. 218-226. – PDF dapat diunduh.
- Arifin Zulkifli, “Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Administrasita (UMSI)* 2020. – termasuk dasar regulasi dan pembinaan kelembagaan.

BAB III – KONSEP DASAR MANAJEMEN ORGANISASI

3.1 Pengertian Manajemen

Manajemen secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan (actuating) dan pengendalian (controlling) sumber daya yang tersedia — baik sumber daya manusia, keuangan, material, maupun informasi. Dalam konteks kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), manajemen berarti kemampuan mengelola kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan wisata, mulai dari membentuk visi dan misi, menyusun strategi kerja, hingga mengevaluasi hasilnya.

Menurut Cipta dalam *Manajemen Organisasi* disebutkan bahwa “perkembangan manajemen organisasi telah melalui berbagai fase dan teori ... yang mencerminkan perubahan dalam cara pandang terhadap pekerjaan.” (Lebih lanjut, dalam literatur pariwisata berbasis masyarakat, konsep manajemen juga semakin mengarah ke pengelolaan partisipatif — dimana masyarakat lokal menjadi subjek dan objek pengelolaan destinasi wisata.

Dengan demikian, dalam modul ini kita definisikan manajemen organisasi Pokdarwis sebagai:

“Proses terpadu yang dilakukan oleh Pokdarwis untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pengembangan wisata berbasis masyarakat agar tercapai tujuan kesejahteraan lokal, pelestarian budaya/alam, dan keberlanjutan.” Dengan definisi tersebut, seluruh sub-bab berikutnya akan menjelaskan unsur-unsur kunci proses manajemen.

3.2 Fungsi-fungsi Manajemen: Planning, Organizing, Actuating, Controlling

Untuk memudahkan pemahaman, fungsi manajemen dibagi menjadi empat tahap utama yang saling terkait.

3.2.1 Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah tahap awal di mana organisasi menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan program kerja. Dalam konteks Pokdarwis, misalnya menetapkan target kunjungan wisatawan, pengembangan produk wisata, atau program pemberdayaan masyarakat. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kondisi internal (misalnya sumber daya manusia anggota

Pokdarwis, potensi desa wisata) dan kondisi eksternal (misalnya akses transportasi, tren wisata, kebijakan pemerintah).

Perencanaan yang kurang matang sering menjadi penyebab kegagalan program karena tidak memperhitungkan risiko maupun kapasitas real.

3.2.2 Organizing (Pengorganisasian)

Setelah perencanaan, fungsi berikutnya adalah mengorganisasikan — yaitu menyusun struktur organisasi, menetapkan peran & tanggung-jawab, mengalokasikan sumber daya, serta menetapkan prosedur kerja. Dalam Pokdarwis, misalnya menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris & Bendahara, dan berbagai bidang seperti Humas & Kemitraan, Atraksi & Produk Wisata, Kebersihan & Keindahan, Pelestarian Lingkungan & Budaya, Keamanan & Ketertiban, dan Pendidikan & Pelatihan. Pengorganisasian yang baik akan memperjelas siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana.

3.2.3 Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah tahap dimana rencana dijalankan oleh anggota organisasi. Fungsi ini juga disebut sebagai leading/directing atau motivating — karena di dalamnya terdapat unsur memimpin, mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, dan mengatasi dinamika kelompok. Sebagai contoh, bidang Pendidikan & Pelatihan Pokdarwis menyelenggarakan workshop bagi anggota dan masyarakat; bidang Humas & Kemitraan menjalin kerja sama dengan dunia usaha atau akademisi; bidang Kebersihan & Keindahan melaksanakan gotong-royong di lingkungan wisata.

3.2.4 Controlling (Pengendalian)

Pengendalian adalah fungsi terakhir yang memastikan bahwa apa yang direncanakan dan dilaksanakan tetap sesuai sasaran, atau jika ada penyimpangan dapat diperbaiki. Pengendalian mencakup monitoring, evaluasi, pelaporan dan umpan balik. Manajemen yang baik akan memiliki indikator kinerja, pelaporan rutin, serta mekanisme revisi program. Dalam Pokdarwis, contohnya meliputi laporan keuangan transparan, evaluasi jumlah pengunjung dan kepuasan wisatawan, serta feedback masyarakat lokal.

Dengan menjalankan keempat fungsi ini secara sistematis, Pokdarwis akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, kita lihat makna efektivitas dan efisiensi dalam konteks manajemen.

3.3 Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi adalah dua prinsip fundamental dalam manajemen organisasi. Efektivitas berarti melakukan hal yang *benar* (doing the right things) — yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi berarti melakukan hal yang *benar-benar* dengan cara yang paling hemat sumber daya (doing things right) — yaitu menggunakan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil.

Contoh khusus di Pokdarwis:

1. Efektivitas: Misalnya tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan sebesar 20 % dalam satu tahun tercapai.
2. Efisiensi: Menggunakan dana pelatihan seminimal mungkin, namun tetap menghasilkan anggota Pokdarwis yang kompeten, atau mengorganisir acara promosi dengan sumber daya lokal, tanpa harus menyewa jasa mahal dari luar.

Dalam praktik manajemen organisasi, ada beberapa prinsip yang membantu mencapai efektivitas dan efisiensi, antara lain: pembagian tugas yang jelas, kesesuaian struktur organisasi dengan strategi, penggunaan informasi yang tepat waktu, pengukuran kinerja, dan continuous improvement.

Untuk organisasi masyarakat seperti Pokdarwis, prinsip ini sangat relevan karena kerap beroperasi dengan sumber daya terbatas — baik dana, SDM, maupun waktu. Oleh karena itu, manajemen yang tegak pada prinsip efektivitas dan efisiensi akan menempatkan Pokdarwis dalam posisi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

3.4 Manajemen Berbasis Partisipasi Masyarakat

Manajemen berbasis partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan dalam pengelolaan pariwisata komunitas dan kelembagaan Pokdarwis. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek wisata atau penerima manfaat pasif, tetapi menjadi subjek pengelola, pengambil keputusan, dan pemilik manfaat.

Dalam literatur, artikel “Community Based Tourism (CBT): Concepts, Opportunities and Challenges” oleh Prakoso, Pradipto, Roychansyah dan Nugraha (2020) menegaskan bahwa “community-based tourism should be managed and owned by the community, where the community gets direct benefits ...” Sementara itu, studi “The Role of Local Community in

Enhancing Sustainable CBT” menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan destinasi wisata.

Dalam modul ini, manajemen partisipatif berarti:

1. Anggota Pokdarwis dan masyarakat diberikan ruang diskusi untuk menyusun visi/misi.
2. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama (forum anggota).
3. Transparansi kegiatan dan keuangan dijamin agar masyarakat turut merasa memiliki.
4. Evaluasi dilakukan bersama masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Dengan manajemen yang berbasis partisipasi, organisasi Pokdarwis akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat, meningkatkan rasa kepemilikan, meminimalkan konflik internal, dan meningkatkan keberlanjutan program.

3.5 Good Governance dalam Kelembagaan Desa Wisata

Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang semakin penting dalam pengelolaan organisasi masyarakat dan destinasi wisata berbasis komunitas. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, aturan yang jelas (rule of law), responsivitas dan inklusivitas.

Dalam konteks pariwisata, studi “Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into ...” (MDPI) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan (stakeholders) dengan manajemen yang terbuka sangat menentukan keberhasilan destinasi wisata yang dikelola masyarakat. ([MDPI](#)) Studi lain di Bali juga menemukan bahwa kombinasi antara governance kolaboratif dan pariwisata inklusif meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata desa.

Untuk Pokdarwis, implementasi good governance berarti:

1. Penyusunan AD/ART dan SK pengukuhan secara resmi.
2. Transparansi keuangan: laporan keuangan tahunan yang dapat diakses anggota.
3. Akuntabilitas: pertanggungjawaban antar bidang dan pengurus.
4. Partisipasi inklusif: semua warga atau anggota komunitas memiliki hak suara dalam kegiatan Pokdarwis.

5. Kerjasama eksternal: menjalin kemitraan dengan pemerintah, akademisi, Swasta, dan lembaga masyarakat.
6. Monitoring dan evaluasi: sistem evaluasi rutin untuk memperbaiki kinerja organisasi dan destinasi.

Dengan good governance sebagai landasan, Pokdarwis dapat bergerak dari sekadar kelompok informal menjadi kelembagaan yang profesional, dipercaya, dan mampu menjawab tantangan masa depan dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Ringkasan dan Penutup

Bab ini telah menggambarkan kerangka konseptual manajemen organisasi khususnya dalam konteks Pokdarwis — mulai dari definisi manajemen, fungsi-fungsi utama, prinsip efektivitas dan efisiensi, hingga manajemen berbasis partisipasi masyarakat dan good governance. Pemahaman mendalam tentang aspek-aspek ini sangat penting agar Pokdarwis tidak hanya sekadar terbentuk, tetapi dijalankan secara terstruktur, partisipatif dan berkelanjutan.

Referensi

- Cipta, TH. “Manajemen Organisasi.” (PDF tersedia)
- Prakoso, A. A., Pradipto, E., Roychansyah, M. S., & Nugraha, B. S. (2020). “Community-based tourism: concepts, opportunities and challenges.” *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 2(2), 95-107.
- The Role of Local Community in Enhancing Sustainable Community-Based Tourism. (2024). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into ... (MDPI)
- Inclusive tourism: A driving force for collaborative governance in ... (AJBR)

BAB IV – STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN POKDARWIS

4.1 Bentuk dan Jenis Kelembagaan Pokdarwis

Kelembagaan Pokdarwis secara umum dibentuk sebagai wadah masyarakat yang secara formal atau semi-formal memiliki tujuan mengembangkan potensi wisata di wilayah desa/kelurahan. Bentuk kelembagaan ini dapat beragam: mulai dari kelompok masyarakat yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) desa, hingga yayasan atau asosiasi yang diakui oleh pemerintah daerah maupun dinas pariwisata. Sebagai contoh, penelitian oleh Purnawati (2021) menunjukkan bahwa “Pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pengembangan wisata di Pantai Gemah Tulungagung” berlangsung melalui proses legalisasi kelompok masyarakat menjadi Pokdarwis formal.

Jenis kelembagaan Pokdarwis dapat dikelompokkan menurut:

1. Tingkat formalitas (formal terdaftar/skala desa vs semi-formal).
2. Lingkup kerja (kelompok lokal saja vs kelompok yang bermitra dengan pihak swasta/gubernur).
3. Inisiatif (inisiatif masyarakat sendiri vs terbentuk melalui program pemerintah).
Dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, jenis kelembagaan yang lebih formal cenderung memiliki akses pendanaan, pelatihan, dan kemitraan yang lebih besar. Dalam studi “Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai” ditemukan bahwa pokdarwis yang mendapat pembinaan formal oleh pemerintah memiliki struktur yang lebih baik dan kerja yang lebih sistematis.

Dalam modul ini, disarankan agar Pokdarwis di desa Anda memilih bentuk kelembagaan yang sesuai konteks lokal: misalnya SK pengukuhan dari kepala desa + AD/ART sederhana + alamat legal sebagai kelompok masyarakat. Dengan begitu, Pokdarwis dapat bekerja dengan legitimasi jelas, dan mendapatkan bimbingan dari pemerintah daerah maupun program pariwisata.

4.2 Analisis Kebutuhan Organisasi

Sebelum menyusun struktur organisasi Pokdarwis, penting dilakukan analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan ini mencakup identifikasi kondisi internal dan eksternal, potensi

dan tantangan, serta kapasitas anggota. Internal mencakup SDM (pengurus dan anggota), sarana-prasarana, dana, sistem informasi, jejaring. Eksternal mencakup kondisi pasar wisata, kebijakan pemerintah, akses ke pasar, lingkungan alam dan budaya, teknologi digital, dan tren wisata.

Studi “Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan Balikpapan: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)” menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada kategori “tokenisme” (skor 52,59), karena analisis kebutuhan organisasi belum ditindaklanjuti secara sistematis.

Analisis kebutuhan organisasi dalam konteks Pokdarwis dapat menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Pemetaan potensi & tantangan: apa potensi wisata desa (alam, budaya, kuliner, homestay)? apa hambatan (akses, SDM, modal, pemasaran)?
2. Analisis pemangku kepentingan: siapa saja yang terlibat? (pemerintah desa, Dinas Pariwisata, pelaku UMKM, masyarakat).
3. Analisis sumber daya: jumlah anggota, keterampilan, modal awal, sarana (homestay, atraksi, transportasi).
4. Analisis kebutuhan klaster organisasi: bidang-bidang apa saja yang perlu dibentuk (misalnya Humas & Kemitraan, Kebersihan & Keindahan, dsb).
5. Prioritas kebutuhan: memilih kebutuhan mana yang segera dikendalikan (misalnya pelatihan SDM, digital marketing) dan mana yang berskala panjang. Hasil dari analisis kebutuhan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai, alokasi anggaran, pembagian tugas, hingga mekanisme kerja.

4.3 Desain Struktur Organisasi yang Ideal

Berdasarkan analisis kebutuhan, struktur organisasi Pokdarwis harus dirancang agar fungsional, adaptif, dan partisipatif. Struktur yang ideal tidak harus sangat rumit—justru sederhana dan mudah dijalankan oleh masyarakat lokal. Salah satu desain struktur yang sering digunakan adalah: Ketua → Wakil Ketua → Sekretaris & Bendahara → Bidang-bidang (Humas & Kemitraan; Atraksi & Produk Wisata; Kebersihan & Keindahan; Pelestarian Lingkungan & Budaya; Keamanan & Ketertiban; Pendidikan & Pelatihan).

Penelitian oleh Artanti, Widowati & Maesaroh (2022) pada Pokdarwis Sukomakmur menyebutkan bahwa struktur yang jelas dengan penanggung jawab bidang yang spesifik menjadikan organisasi lebih “hidup” dan aktif dalam kegiatan.

Dalam mendesain struktur organisasi yang ideal, beberapa prinsip perlu diperhatikan:

1. Kejelasan peran: setiap posisi dan bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi.
2. Kesesuaian struktur dengan skala organisasi: untuk Pokdarwis yang baru berdiri, struktur sederhana saja cukup; untuk yang sudah berkembang bisa menambahkan bidang tambahan (misalnya digital marketing, homestay management).
3. Partisipatif: anggota diberikan hak untuk memberikan aspirasi, bukan sekadar ditugaskan.
4. Fleksibilitas: struktur dapat berubah mengikuti kebutuhan, misalnya menambah bidang baru atau menggabungkan fungsi.
5. Akuntabilitas: ada mekanisme pelaporan dan pengendalian internal agar setiap bidang berjalan sesuai rencana. Sebagai langkah praktis: susun bagan organisasi, buat deskripsi jabatan lengkap (job description), buat alur pelaporan, dan buat jadwal rapat rutin pengurus.

4.4 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Anggota

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas merupakan kunci agar Pokdarwis dapat berjalan efektif. Dalam contoh struktur ideal di atas:

1. Ketua: Mengkoordinasi seluruh kegiatan, menjadi wakil Pokdarwis di luar, menetapkan strategi organisasi dan menjalin kemitraan.
2. Wakil Ketua: Membantu Ketua, menggantikan bila Ketua berhalangan, mengawasi pekerjaan bidang-bidang.
3. Sekretaris: Bertanggung jawab atas administrasi, dokumentasi, notulen rapat, komunikasi internal.
4. Bendahara: Mengelola keuangan, membuat laporan keuangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

5. Bidang Humas & Kemitraan: Menjalin jaringan dengan pemerintah, swasta, media sosial, promosi destinasi.
 6. Bidang Atraksi & Produk Wisata: Mengembangkan produk wisata (kuliner, craft, atraksi budaya/alam), mengelola homestay.
 7. Bidang Kebersihan & Keindahan: Mengorganisir kegiatan gotong-royong, menjaga kebersihan destinasi, pengelolaan sampah.
 8. Bidang Pelestarian Lingkungan & Budaya: Menjaga kearifan lokal, tradisi budaya, konservasi alam dan biodiversity.
 9. Bidang Keamanan & Ketertiban: Menjamin keamanan wisatawan dan masyarakat, penanganan risiko, koordinasi dengan pihak keamanan desa.
 10. Bidang Pendidikan & Pelatihan: Mengadakan pelatihan bagi anggota dan masyarakat, membangun kapasitas SDM.
- Studi di Desa Telagah (Kabupaten Langkat) menunjukkan bahwa Pokdarwis yang pembagian peran dan tanggung-jawabnya kurang jelas justru memiliki kinerja yang masih rendah — “kualitas layanan sarana dan prasarana masih sangat terbatas” (Prodi Ilmu Administrasi Univ. Sumatera Utara)

Untuk praktik di lapangan, disarankan agar setiap bidang memiliki “To-Do List” tahunan, indikator capaian, dan rapat evaluasi setiap kuartal agar tanggung jawab tetap terpantau.

4.5 Mekanisme Kerja dan Koordinasi Internal

Mekanisme kerja dan koordinasi internal adalah bagaimana seluruh struktur organisasi Pokdarwis menjalankan rutinitas operasional, menjaga komunikasi antar bidang, serta memastikan semua aktivitas berjalan sinergis. Beberapa elemen penting mekanisme kerja antara lain:

- Rapat rutin pengurus: misalnya bulanan atau tahunan, dengan notulen dan kehadiran anggota.
- Rapat bidang: setiap bidang melakukan koordinasi internal untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan.

- Alur komunikasi: dari Ketua → Wakil → Sekretaris → bidang; dan bidang bisa melaporkan ke Sekretaris/Bendahara.
- Dokumentasi kegiatan: agenda, laporan keuangan, daftar peserta pelatihan, foto kegiatan dan media sosial.
- Sistem pelaporan internal: setiap bidang wajib menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan pada periode yang ditetapkan.
- Koordinasi antar-bidang: misalnya acara promosi wisata memerlukan kerjasama Humas & Kemitraan, Atraksi & Produk Wisata, dan Kebersihan & Keindahan.
- Koordinasi eksternal: bidang Humas & Kemitraan dan Pelestarian Lingkungan & Budaya menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, dinas pariwisata, akademisi, swasta.

Sebagai contoh praktik mekanisme kerja yang baik, studi “Community participation in Indonesian sustainable tourism” menekankan bahwa koordinasi multi-stakeholder menjadi komponen sukses dalam organisasi pariwisata berbasis masyarakat.

Dengan mekanisme kerja yang baik, Pokdarwis dapat menghindari silo bidang, duplikasi kegiatan, atau konflik internal. Disarankan pula membuat manual prosedur operasi standar (SOP) sederhana—misalnya bagaimana bidang mengusulkan kegiatan, bagaimana anggaran disetujui, bagaimana evaluasi dilakukan.

4.6 Studi Kasus: Kelembagaan Pokdarwis Sukses di Indonesia

Untuk memperjelas konsep di atas, berikut contoh studi kasus keberhasilan kelembagaan Pokdarwis:

Studi Kasus 1 – Pokdarwis Pantai Gemah, Tulungagung
Purnawati (2021) dalam risetnya menunjukkan bahwa Pokdarwis Lejar Misuwur di Pantai Gemah berhasil meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dengan memperkuat kelembagaan (SK desa, AD/ART), pelatihan anggota, dan kemitraan dengan pihak swasta. Hasilnya: meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Studi Kasus 2 – Pokdarwis Desa Munduk, Buleleng Penelitian oleh Putrawan & Ardana (2023) menunjukkan bahwa Pokdarwis di Desa Munduk telah tampil sebagai fasilitator komunitas, menggerakkan masyarakat, dan menjalin kemitraan lokal dengan efek positif.

Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, faktor keberhasilan kelembagaan Pokdarwis meliputi: legitimasi formal, struktur organisasi yang jelas, kapabilitas anggota, jejaring kemitraan, sistem koordinasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan monitoring evaluasi rutin. Sebaliknya, hambatan umum termasuk: kurangnya SDM, modal terbatas, minimnya dukungan pemerintah, dan koordinasi yang lemah.

Sebagai latihan praktis, peserta pelatihan dapat melakukan *benchmarking* kelembagaan Pokdarwis di daerah lain, lalu memetakan faktor-kunci keberhasilan dan hambatan dalam konteks lokal mereka.

Penutup

Bab ini telah membahas secara rinci aspek-kelembagaan Pokdarwis: mulai dari bentuk dan jenis kelembagaan, analisis kebutuhan organisasi, desain struktur organisasi yang ideal, pembagian peran dan tanggung-jawab, mekanisme kerja dan koordinasi internal, hingga studi kasus keberhasilan di Indonesia. Pemahaman dan penerapan elemen-elemen ini penting agar Pokdarwis tidak hanya berbentuk secara formal, tetapi berjalan efektif, partisipatif, dan berdampak nyata terhadap pengembangan desa wisata.

Referensi

- Purnawati, L. (2021). *Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pengembangan Wisata di Pantai Gemah Tulungagung*. PUBLICIANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14(2). PDF tersedia.
- Arifin, Z. (2020). *Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai*. Jurnal Ilmiah Administrasita, 11(2). PDF tersedia. (
- Artanti, N., Widowati, N., Maesaroh. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sukomakmur dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang*. JPPMR. PDF tersedia.
- Aprilani, T.L. (2023). *The Concept of Community-Based Tourism Development*. JTOSPOLBAN. PDF available.
- Ahsani, R.D.P. (2022). *The Challenges and Opportunities for Developing Community-Based Tourism in Indonesia*. PDF available.

BAB V – KEPEMIMPINAN DAN DINAMIKA KELOMPOK

5.1 Konsep Kepemimpinan dalam Organisasi Masyarakat

Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam kelangsungan dan keberhasilan organisasi masyarakat seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Kepemimpinan dalam konteks organisasi masyarakat berbeda dari kepemimpinan di korporasi besar: ia harus mampu melakukan fasilitasi, menginspirasi partisipasi masyarakat, menjaga inklusi, dan membangun rasa kepemilikan kolektif. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah artikel, “Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Organisasi: Studi...” bahwa pemimpin dalam organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Konsep kepemimpinan mencakup berbagai pendekatan — misalnya kepemimpinan transaksional, transformasional, dan kepemimpinan partisipatif atau komunitas-berbasis (community-based leadership). Sebuah studi tentang kepemimpinan di desa wisata menunjukkan bahwa kombinasi gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan berbasis komunitas berhasil meningkatkan pembangunan desa wisata.

Dalam modul ini, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang atau kelompok pengurus Pokdarwis untuk mempengaruhi, memobilisasi, dan mengendalikan proses organisasi sehingga semua anggota ikut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pemimpin Pokdarwis harus mampu menjaga keseimbangan antara pengarahan dan pemberdayaan anggota — artinya bukan sekadar “memerintah” tetapi mengajak, berdialog, membangun kapabilitas anggota.

Tugas kepemimpinan dalam organisasi masyarakat meliputi: menetapkan visi dan arah bersama; membangun struktur yang inklusif; memastikan mekanisme partisipatif; mengelola konflik; dan mengawal keberlanjutan kegiatan. Salah satu riset menyebutkan bahwa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, “leadership behaviour, community-based leadership, stakeholder engagement...” sangat mempengaruhi kesuksesan transformasi komunitas.

Dengan demikian, di sub-bab berikutnya kita akan melihat gaya kepemimpinan yang efektif untuk Pokdarwis, kemudian dinamika kelompok, lalu teknik fasilitasi dan pengambilan

keputusan, serta komunikasi efektif — semua aspek tersebut saling terkait dan kritikal untuk keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi masyarakat.

5.2 Gaya Kepemimpinan yang Efektif bagi Pokdarwis

Gaya kepemimpinan merujuk pada cara seorang pemimpin mengambil keputusan, memberikan arahan, berkomunikasi dengan anggota, memotivasi, serta menangani tantangan. Dalam konteks Pokdarwis, gaya kepemimpinan yang efektif harus bersifat kolaboratif, transparan, adaptif, dan partisipatif.

Menurut Nawawi (2003:113) dan Malayu (2000:167), gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan konteks pariwisata komunitas, studi “The Influence of Leadership Style and Stakeholders on Sustainable Village Development Through Community-Based Tourism” menemukan bahwa gaya kepemimpinan transaksional yang fokus pada supervisi dan arahan memiliki pengaruh terhadap partisipasi komunitas dalam pengembangan wisata desa. Namun, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan saja tidak cukup — diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan, kapasitas komunitas, dan dukungan institusional. Maka dari itu, bagi Pokdarwis disarankan untuk memilih gaya kepemimpinan yang menyatukan elemen:

- Transformasional: memotivasi anggota untuk berpikir kreatif, memiliki visi jangka panjang, dan merasa peduli terhadap komunitas.
- Partisipatif/Komunitas-Berbasis: melibatkan anggota komunitas dalam pengambilan keputusan, memastikan suara lokal didengar, dan membangun kepemilikan bersama.
- Servant leadership (kepemimpinan pengabdian): pemimpin menempatkan diri sebagai pelayan bagi anggota dan masyarakat, bukan hanya sebagai pengarah. Contoh: dalam Pokdarwis, Ketua yang sukses akan mengadakan forum anggota untuk menetapkan visi bersama, mengundang masukan dari warga, membuka kesempatan bagi anggota untuk memimpin bidang masing-masing, serta memfasilitasi pelatihan daripada hanya memberikan instruksi.

Kunci keberhasilan gaya kepemimpinan efektif meliputi: komunikasi terbuka, pembangunan kapasitas anggota (pelatihan, mentoring), mekanisme feedback, kepercayaan antar anggota, dan kontinuitas kepemimpinan yang baik (regenerasi). Dengan gaya yang tepat, struktur kelembagaan Pokdarwis tidak hanya berjalan formal tetapi dinamis, adaptif terhadap tantangan seperti perubahan tren wisata, pandemi, teknologi digital, dan perubahan demografi.

5.3 Dinamika Kelompok dan Konflik Internal

Dinamika kelompok adalah proses bagaimana anggota organisasi berinteraksi, berkomunikasi, membangun identitas kelompok, berbagi norma, mengembangkan kultur kerja, serta menangani perbedaan dan konflik. Dalam organisasi masyarakat seperti Pokdarwis, dinamika kelompok menjadi sangat penting karena anggotanya berasal dari masyarakat lokal yang memiliki latar belakang berbeda (usia, pekerjaan, latar sosial, budaya). Konflik internal bisa timbul dari: perbedaan visi misi, distribusi manfaat wisata yang tidak merata, pembagian tugas yang tidak jelas, perselisihan personal, atau kurangnya komunikasi. Sebuah studi tentang “Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Organisasi” menunjukkan bahwa konflik merupakan hal yang kerap terjadi dalam organisasi dan pemimpin harus memiliki strategi dalam mengelola konflik tersebut.

Untuk memahami dinamika kelompok, kita dapat mengacu model Tuckman (1965): Forming → Storming → Norming → Performing. Pada tahap *Storming*, konflik dan ketegangan sering muncul karena perbedaan persepsi dan peran anggota. Pemimpin Pokdarwis harus mampu memfasilitasi transisi ke *Norming* dan *Performing* melalui komunikasi terbuka, pembagian tugas yang jelas, dan kegiatan bersama yang memperkuat kebersamaan. Strategi pengelolaan konflik meliputi:

1. Penetapan norma kelompok dan kode etik (misalnya AD/ART Pokdarwis)
2. Rapat rutin untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama
3. Mediasi jika terjadi perselisihan antar anggota atau bidang
4. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya (uang, produk wisata, manfaat)

Penguatan identitas bersama (misalnya semboyan, logo, kegiatan bersama)
Contoh kasus: Dalam organisasi masyarakat yang kurang mempunyai mekanisme menangani konflik, dinamika kelompok cenderung stagnan atau bahkan bubar karena muncul resistensi

anggota—sering disebut sebagai “kelompok tidak hidup”. Oleh karena itu modul ini menyarankan agar sesi pelatihan dalam Pokdarwis mencakup *team building*, *shared visioning*, serta *dialog refleksi antar bidang*.

Dinamika kelompok yang sehat akan menghasilkan tingkatan *performing* di mana anggota aktif, saling mendukung, inisiatif muncul dari bawah, dan organisasi berjalan tanpa tergantung pemimpin tunggal.

5.4 Teknik Fasilitasi dan Pengambilan Keputusan

Fasilitasi dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting agar organisasi Pokdarwis berjalan partisipatif dan inklusif. Fasilitasi berarti pemimpin (atau fasilitator rapat) mengatur proses, menciptakan suasana yang mendorong partisipasi anggota, memunculkan ide-ide, dan menjaga agar diskusi tidak didominasi oleh satu pihak saja. Teknik fasilitasi yang umum digunakan antara lain brainstorming, world café, diskusi kelompok kecil, dan simulasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi masyarakat idealnya menerapkan prinsip musyawarah atau voting, tergantung kesepakatan. Hal ini memastikan legitimitas keputusan dan partisipasi anggota. Sebagai contoh, dalam Pokdarwis ketika akan menetapkan program kerja tahunan, semua bidang menyerahkan usulan, lalu rapat umum anggota memilih prioritas bersama.

Beberapa langkah praktis dalam teknik fasilitasi dan pengambilan keputusan:

1. Pemimpin membuka rapat dengan tujuan dan agenda yang jelas.
2. Fasilitator membagi kelompok kecil untuk diskusi topik tertentu (misalnya pengembangan produk wisata).
3. Setiap kelompok melaporkan hasil diskusi, fasilitator mencatat ide.
4. Semua anggota menyepakati kriteria pengambilan keputusan (misalnya manfaat sosial, feasibility, sumber daya).
5. Anggota memilih atau memilih secara musyawarah usulan terbaik.
6. Keputusan dituangkan dalam notulen dan rencana aksi (who, what, when, how).

7. Laporan dan evaluasi pasca-pelaksanaan dilakukan untuk memastikan keputusan diikuti dan dievaluasi.

Literatur menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai mekanisme pengambilan keputusan inklusif cenderung memiliki tingkat komitmen anggota lebih tinggi dan performa yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang gaya kepemimpinan dan dinamika kelompok di industri pariwisata, ditemukan bahwa kepemimpinan yang inklusif dan pengambilan keputusan partisipatif berkontribusi pada efisiensi tim.

Untuk Pokdarwis, modul ini menyarankan agar setiap rapat besar dilakukan minimal dua kali setahun dengan agenda penyusunan rencana kerja dan evaluasi, serta rapat bidang dilakukan kuartalan dengan laporan tertulis.

5.5 Komunikasi Efektif dalam Organisasi Pokdarwis

Komunikasi adalah jantung dari semua proses organisasi—tanpa komunikasi yang efektif, kepemimpinan, dinamika kelompok, perencanaan, dan pengambilan keputusan akan terganggu. Komunikasi yang efektif dalam Pokdarwis harus bersifat dua arah (pemimpin ↔ anggota), terbuka, tepat waktu, dan disesuaikan dengan karakter masyarakat lokal (misalnya menggunakan bahasa lokal, media tradisional, sosial media). Sebuah kajian internasional “Communication, Leadership, and ...” menekankan bahwa dalam tourism community-based, komunikasi memainkan peran penting dalam keberhasilan inklusi, partisipasi dan pengelolaan sosial kapital.

Beberapa praktik komunikasi efektif dalam Pokdarwis antara lain:

1. Penggunaan platform sederhana untuk update kegiatan (WhatsApp group, Telegram, papan pengumuman desa)
2. Laporan kegiatan dan keuangan secara rutin disampaikan kepada anggota dan masyarakat
3. Feedback terbuka: pemimpin meminta input dan kritik dari anggota setelah kegiatan
4. Cerita (storytelling) dari anggota yang sukses demi memotivasi anggota lain

5. Media kemitraan seperti website desa wisata, akun sosial media, brosur yang dikelola
bidang Humas & Kemitraan

Komunikasi yang buruk—misalnya hanya oleh Ketua tanpa melibatkan anggota, atau informasi terlambat—sering menjadi penyebab konflik internal, resistensi anggota, dan stagnasi organisasi. Oleh karena itu, modul ini merekomendasikan agar Pokdarwis menyusun protokol komunikasi internal: siapa yang menyampaikan apa, kapan, melalui media apa, dan tindak lanjutnya.

Dengan komunikasi yang efektif, kepemimpinan akan terasa transparan, anggota merasa dihargai, dinamika kelompok menjadi positif, dan pengambilan keputusan mendapat dukungan penuh dari semua anggota.

Penutup

Pada bab ini telah dibahas secara rinci lima aspek penting dalam penguatan kelembagaan Pokdarwis: konsep kepemimpinan dalam organisasi masyarakat, gaya kepemimpinan yang efektif, dinamika kelompok dan konflik internal, teknik fasilitasi serta pengambilan keputusan, dan komunikasi efektif dalam organisasi. Semua aspek ini saling terkait — kepemimpinan yang baik mendorong dinamika kelompok yang sehat; dinamika kelompok yang baik memerlukan komunikasi efektif; dan semua itu memerlukan teknik fasilitasi serta pengambilan keputusan yang partisipatif.

Untuk memaksimalkan efektivitas modul pelatihan ini, disarankan agar setiap anggota Pokdarwis diberikan latihan praktis—misalnya simulasi rapat pengambilan keputusan, role-play konflik internal, dan workshop komunikasi. Dengan demikian, Pokdarwis bukan hanya sadar struktur, tetapi hidup secara dinamis, responsif terhadap perubahan, dan mampu menumbuhkan kepemimpinan lokal yang berkelanjutan.

Referensi

- Rakhman, C. U., Kharisma, L., & Suryadana, M. (2023). *Combination of Transformational and Community-Based Leadership Model in the Development of Pujon Kidul Tourism Village, Indonesia*. Journal of Leadership in Organizations. PDF tersedia.
- Lepir, P. R. (2024). *Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Kearifan Lokal*. Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, UKSW. PDF tersedia.

- Chin, W. L., et al. (2022). *Communication, Leadership, and Community-Based Indigenous Tourism...* ASEAS Journal. PDF tersedia.
- Teori dan Gaya Kepemimpinan Dalam Membentuk Karakter... (2024). Rimba: Jurnal Ilmu Sosial. PDF tersedia.
- IJLER (2024). *Kepemimpinan yang Efektif Mencapai Tujuan Organisasi di ...* PDF tersedia.

BAB VI – PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KERJA

6.1 Menyusun Rencana Kerja (Workplan) Pokdarwis

Salah satu tahap krusial dalam pengembangan kelembagaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) adalah penyusunan rencana kerja (workplan). Rencana kerja ini berfungsi sebagai peta jalan (road-map) operasional selama periode tertentu—misalnya satu tahun—yang memuat kegiatan dalam berbagai bidang organisasi (Humas & Kemitraan; Atraksi & Produk Wisata; Kebersihan & Keindahan; Pelestarian Lingkungan & Budaya; Keamanan & Ketertiban; Pendidikan & Pelatihan). Dengan workplan, Pokdarwis memiliki fokus, target, alokasi sumber daya, dan jadwal yang jelas.

Penyusunan workplan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan visi, misi dan tujuan tahunan organisasi Pokdarwis.
2. Menginventarisasi program/kegiatan yang relevan dengan tujuan (contoh: pelatihan pemandu wisata, pengembangan produk lokal, gotong-royong kebersihan destinasi, promosi digital).
3. Menetapkan indikator keberhasilan (misalnya jumlah wisatawan, pendapatan masyarakat, jumlah UMKM yang terlibat, tingkat kepuasan wisatawan).
4. Menyusun jadwal kegiatan (kuartal, semester, tahun) dan menetapkan siapa bertanggung-jawab (bidang/fungsi).
5. Menentukan alokasi sumber daya: dana, SDM, sarana/prasarana, kemitraan eksternal.
6. Menetapkan mekanisme pelaporan dan evaluasi (laporan triwulan, laporan tahunan).

Mengapa workplan penting? Karena tanpa perencanaan yang tertulis, organisasi sering mengalami “kegiatan ad hoc” yang tidak sinergis, sumber daya terbuang, dan sulit dievaluasi. Dalam riset tentang pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, ditemukan bahwa kelompok yang memiliki rencana kerja tertulis menunjukkan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi.

Untuk memudahkan anggota Pokdarwis yang mungkin bukan dari latar manajemen, modul ini dapat menyertakan template workplan sederhana (format tabel) yang memuat kolom: Kegiatan, Waktu, Penanggung Jawab, Anggaran, Indikator Hasil, Status.

6.2 Analisis SWOT dan Perencanaan Strategis

Setelah workplan disusun secara umum, langkah berikut adalah melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai bagian dari perencanaan strategis organisasi. Analisis ini membantu Pokdarwis memahami kondisi internal (kekuatan, kelemahan) dan eksternal (peluang, ancaman) sehingga bisa memilih dan menyusun strategi yang tepat. Studi “Strategic planning for tourism industry using SWOT and QSPM” menjelaskan bagaimana SWOT digunakan dalam pengembangan wisata.

Contoh:

Kekuatan (Strengths): potensi alam/budaya desa, komunitas yang swadaya, lokasi strategis.

Kelemahan (Weaknesses): SDM terbatas, infrastruktur buruk, kurangnya sumber dana.

Peluang (Opportunities): tren wisata lokal meningkat pasca pandemi, dukungan pemerintah, kemitraan industri. Ancaman (Threats): persaingan destinasi, perubahan regulasi pariwisata, kerusakan lingkungan.

Dalam penelitian “Ecotourism development with SWOT analysis as an effort ...” di Indonesia, penggunaan SWOT terbukti penting dalam menetapkan strategi keberlanjutan. Setelah faktor-faktor SWOT teridentifikasi, Pokdarwis dapat membuat strategi seperti: memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang (S-O), memperbaiki kelemahan untuk menghadapi ancaman (W-T), atau strategi kombinasi lainnya. Modul ini sebaiknya menyertakan template matriks SWOT dan contoh pengisian yang sederhana agar peserta pelatihan dapat mempraktikkan langsung.

Dengan demikian, analisis SWOT menjembatani antara rencana kegiatan (workplan) dengan strategi operasional jangka menengah hingga panjang.

6.3 Penetapan Prioritas Program

Rencana kerja dan analisis SWOT telah tersedia—langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas program. Hal ini penting karena jumlah kegiatan yang direncanakan biasanya lebih banyak daripada kapasitas organisasi yang terbatas (waktu, dana, SDM). Oleh karena itu, Pokdarwis harus memilih program mana yang akan dilaksanakan lebih dulu maupun secara bertahap. Kriteria penetapan prioritas dapat mencakup:

1. Tingkat urgensi (apakah kegiatan harus segera dilaksanakan)
2. Dampak terhadap masyarakat (berapa banyak anggota/komunitas yang mendapatkan manfaat)
3. Kesesuaian dengan visi/misi organisasi
4. Ketersediaan sumber daya
5. Kemitraan dan dukungan eksternal

Dalam penelitian tentang kesiapan komunitas untuk pariwisata berbasis masyarakat di Lombok Island, disebutkan bahwa tingkat kesiapan yang tinggi mengindikasikan bahwa program yang diprioritaskan harus mengedepankan aspek sosial dan ekonomi yang nyata.

Contoh prioritas: (1) Pelatihan pemandu wisata dan UMKM wisata; (2) Pengembangan atraksi budaya setempat; (3) Promosi digital destinasi; (4) Program kebersihan dan pengelolaan lingkungan; (5) Kemitraan dengan swasta untuk homestay. Pokdarwis dapat membagi program menjadi: “prioritas utama tahun 1”, “prioritas jangka menengah tahun 2-3”, “program jangka panjang”. Hal ini membantu anggota dan mitra memahami fokus organisasi dan menjadwalkan sumber daya secara realistis.

6.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan program prioritas mengarah ke bagian pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan harus sistematis agar workplan dapat dijalankan, bukan hanya menjadi dokumen formalitas. Elemen kunci mencakup:

1. Pembentukan tim pelaksana: masing-masing bidang memiliki tim kerja dan penanggung jawab.
2. Alokasi anggaran dan sumber daya: dana, waktu, SDM, sarana/prasarana.
3. Jadwal pelaksanaan dan milestone kegiatan: kapan, dimana, bagaimana, siapa.
4. Prosedur persetujuan dan perubahan: misalnya rapat bidang dan rapat umum anggota untuk menyetujui dan merevisi rencana.
5. Dokumentasi aktivitas: daftar hadir, foto kegiatan, laporan keuangan, media sosial.

6. Kemitraan eksternal: kerja sama dengan pemerintah desa, dinas pariwisata, perguruan tinggi, pelaku industri.

Riset partisipasi aksi di komunitas turistik Indonesia menunjukkan bahwa metode penelitian partisipatif (Participatory Action Research/PAR) sangat efektif dalam fase pelaksanaan. Selain itu, pemecahan kegiatan menjadi paket kerja (work packages) membantu pengelolaan: misalnya paket promosi digital, paket pelatihan SDM, paket atraksi budaya, paket kebersihan lingkungan. Setiap paket punya leader, indikator keberhasilan, budget dan timeline. Penting juga menetapkan mekanisme pelaporan rutin—misalnya laporan bulanan kepada Ketua, laporan kuartal ke rapat anggota, serta laporan tahunan ke pemerintah desa atau instansi terkait. Transparansi pelaksanaan mendukung akuntabilitas organisasi.

6.5 Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Tahap terakhir yang sangat penting namun sering diabaikan adalah monitoring dan evaluasi (M & E). Monitoring adalah proses pengumpulan dan pelaporan data pelaksanaan secara reguler; evaluasi adalah analisis terhadap apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, mencapai indikator, dan bagaimana faktor-penyebab keberhasilan atau kegagalan. Organisasi Pokdarwis yang kuat akan memiliki sistem M & E yang sederhana namun rutin. Beberapa langkah penting dalam M & E:

1. Menetapkan indikator kinerja (key performance indicators/KPIs) sejak awal—misalnya jumlah wisatawan, pendapatan masyarakat, jumlah mitra, tingkat kepuasan wisatawan, pelestarian lingkungan.
2. Membandingkan realisasi dengan target (variance analysis) dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan.
3. Pelaporan oleh bidang/bidang kerja ke sekretariat, disampaikan ke rapat anggota umum.
4. Refleksi bersama: rapat evaluasi rutin (misalnya setiap 6 bulan) dengan anggota dan mitra untuk membahas hasil, hambatan, dan rencana perbaikan.

5. Pengarsipan hasil evaluasi dan revisi workplan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan lingkungan eksternal.

Riset “Sustainable Community-Based Tourism Development Model...” menjelaskan bahwa evaluasi dan revisi rencana kerja berkala sangat mendukung keberlanjutan organisasi berbasis masyarakat.

Dalam modul, kami sarankan agar Pokdarwis membuat dashboard sederhana (misalnya excel atau Google Sheet) yang mencatat indikator setiap bidang – realisasi vs target – dan menggunakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi bukan hanya mengecek angka, tetapi menanyakan “apa yang berjalan baik?”, “apa yang tidak?”, “apa yang akan diperbaiki?”, “apa pelajaran yang didapatkan?”

Dengan mekanisme M & E yang baik, workplan dan pelaksanaan akan terus diperbaiki, sumber daya digunakan lebih efektif, dan organisasi Pokdarwis menjadi lebih adaptif terhadap perubahan—misalnya pandemi, tren wisata digital, atau perubahan kebijakan pemerintah.

Penutup

Bab ini telah membahas secara detail bagaimana Pokdarwis dapat menyusun dan menjalankan program kerja secara sistematis: mulai dari penyusunan workplan, analisis SWOT dan perencanaan strategis, penetapan prioritas program, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Implementasi elemen-elemen ini sangat menentukan apakah sebuah Pokdarwis akan berjalan secara rutinitas, terukur, dan berkelanjutan—atau hanya sekadar simbol formalitas. Modul ini menyediakan panduan bagi peserta pelatihan baik pengurus Pokdarwis maupun anggota masyarakat—untuk mampu mengelola organisasi mereka seperti lembaga yang profesional namun tetap berbasis masyarakat. Selanjutnya, peserta akan diarahkan pada latihan praktek: menyusun workplan sendiri untuk tahun depan, melakukan analisis SWOT bersama, dan membuat rencana monitoring sederhana untuk tahun pelaksanaan.

Referensi Pilihan

- Panteleiev, V. (2023). *Application of SWOT Analysis to Justify the ...* (PDF tersedia)
- Suprianto, L. H. (2022). *Village Tourism Regional Development Plan Model with ...* (IJSSERS) (PDF tersedia)
- Nirwana, H. D. (2024). *Ecotourism development with SWOT analysis as an effort ...* (PDF tersedia)
- Sayuti, R. H., dkk. (2023). *Community Readiness in Implementing Sustainable Tourism on Small Islands, Indonesia*. Sustainability. (PDF/HTML tersedia)
- Abbas, M. H. I., Sumanto, A., Priambodo, M. P., & Satrio, Y. D. (2023). *Sustainable Community-Based Tourism Development Model in Malang, Indonesia: A Participatory Action Research*. (PDF tersedia)

BAB VII – ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ORGANISASI

7.1 Prinsip Administrasi Organisasi

Administrasi organisasi merupakan rangkaian aktivitas sistematis dalam suatu organisasi—mulai dari penyusunan sistem, pencatatan, pengarsipan, koordinasi, hingga evaluasi—yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sebagaimana disebutkan dalam literatur: “Administrasi penting dalam kehidupan masyarakat karena administrasi merupakan serangkaian kegiatan penyelenggaraan pencapaian tujuan masyarakat.”

Bagi sebuah kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) (Pokdarwis), prinsip administrasi yang baik menjadi fondasi agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan tertib, terlacak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa prinsip administrasi yang penting untuk diinternalisasi oleh anggota dan pengurus Pokdarwis antara lain:

1. Keteraturan (Orderliness): Semua kegiatan, dokumen, alur kerja harus tertata dengan baik — dari penyusunan agenda, rapat, pencatatan hingga pelaporan.
2. Keterukuran (Measurability): Aktivitas dan hasilnya harus dapat diukur — misalnya jumlah peserta pelatihan, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah UMKM yang terlibat.
3. Ketepatan Waktu (Timeliness): Administrasi harus dilakukan sesuai jadwal, agar informasi tetap relevan dan keputusan bisa tepat.
4. Kepastian Tata Kelola (Governance): Sistem administrasi harus mengikuti kebijakan, regulasi dan standar yang berlaku — termasuk AD/ART, SK pengukuhan, dan aturan internal organisasi.
5. Partisipasi (Participation): Anggota organisasi harus dilibatkan dalam administrasi — bukan hanya sebagai obyek laporan tetapi sebagai partisipan aktif dalam proses pencatatan dan evaluasi.

Contoh penerapan prinsip-administrasi dalam Pokdarwis: pengurus membuat jadwal rapat tahunan, membuat daftar hadir, membuat notulen, mendokumentasikan foto kegiatan, menyimpan bukti keuangan, dan menyampaikan laporan kepada anggota serta mitra. Praktik tertib administrasi semacam itu akan meningkatkan kredibilitas Pokdarwis di mata pemerintah,

mitra swasta, dan masyarakat. Dalam penelitian “Tertib Administrasi Organisasi melalui Pelatihan Administrasi Keuangan...” ditemukan bahwa pelatihan administrasi keuangan bagi pengurus organisasi masyarakat meningkatkan ketaatan administrasi, yang berdampak positif terhadap kinerja organisasi.

Dengan menginternalisasi prinsip-administrasi di tingkat Pokdarwis, organisasi tidak hanya “ada” secara formal tetapi juga berfungsi secara operasional dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan pendanaan kepada pemangku kepentingan.

7.2 Pencatatan dan Dokumentasi Kegiatan

Pencatatan dan dokumentasi merupakan elemen penting dari administrasi organisasi karena melalui proses ini, seluruh aktivitas organisasi terdokumentasi, dapat dilacak, dan menjadi dasar untuk evaluasi. Bagi Pokdarwis, aspek ini meliputi:

1. Daftar hadir pada rapat atau pelatihan;
2. Notulen rapat, yang mencatat keputusan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan;
3. Dokumentasi kegiatan berupa foto, video, brosur, media sosial;
4. Arsip dokumen seperti SK pengukuhan, AD/ART, kerja sama (MoU), laporan keuangan;
5. Sistem penyimpanan baik fisik (map, folder) maupun digital (dropbox, Google Drive) yang menjaga keamanan dan kemudahan akses.

Pentingnya pencatatan dan dokumentasi dikemukakan oleh penelitian “Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Kecamatan ...” yang menegaskan bahwa pengelolaan administrasi keuangan yang sistematis melalui pencatatan-dokumen menghasilkan laporan yang “factual dapat dipercaya” dan memperkuat akuntabilitas organisasi.

Dalam konteks Pokdarwis, tata pencatatan dapat dibuat lebih sederhana, misalnya:

- Folder “Rapat dan Keputusan” (menyimpan notulen, daftar hadir)
- Folder “Kegiatan” (foto, brosur, laporan kegiatan tiap bidang)
- Folder “Keuangan” (anggaran, bukti pengeluaran, laporan keuangan bidang)
- Folder “Kemitraan dan Regulasi” (SK, MoU, perjanjian kerja sama).

Dokumentasi yang baik tidak hanya berhenti pada pengarsipan, tetapi harus digunakan sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Sebagai contoh, setiap kegiatan Pokdarwis bisa ditutup dengan sesi “pelajaran yang didapat” dan dokumentasinya disimpan sebagai referensi untuk kegiatan berikutnya. Dengan demikian, pencatatan dan dokumentasi menjadi “bank pengetahuan” organisasi yang dapat diwariskan ke pengurus berikutnya.

7.3 Manajemen Keuangan Sederhana

Manajemen keuangan sederhana adalah kemampuan organisasi untuk mengelola aliran masuk dan keluar dana secara sistematis, transparan, dan efisien, tanpa harus menggunakan sistem kompleks seperti perusahaan besar. Untuk Pokdarwis, manajemen keuangan yang baik menjamin keberlanjutan organisasi, kepercayaan anggota dan mitra, serta akses ke dukungan eksternal (dana hibah, CSR swasta). Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Penyusunan anggaran: sebelum periode kegiatan, susun anggaran tahunan yang mencakup seluruh bidang organisasi, termasuk pendapatan (misalnya iuran anggota, dana desa/kelurahan, hibah, hasil usaha wisata) dan pengeluaran (pelatihan, promosi, pengelolaan destinasi, administrasi).
2. Rekam transaksi keuangan: setiap penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan—misalnya buku kas harian atau sistem spreadsheet sederhana.
3. Pisahkan keuangan organisasi dan pribadi pengurus: agar tidak terjadi konflik kepentingan dan memudahkan audit internal.
4. Kontrol pengeluaran: pengeluaran harus disetujui minimal oleh dua pihak (contoh Ketua dan Bendahara) dan memiliki bukti yang jelas.
5. Laporan keuangan berkala: misalnya bulanan atau kuartalan, yang mencakup realisasi anggaran vs rencana, saldo kas, dan catatan pengeluaran.

•

Penelitian “The Village Financial Management Through Accountability, Transparency and Community Participation” menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. ([ResearchGate](#)) Untuk memudahkan anggota Pokdarwis, modul dapat menyertakan format sederhana: “Lembar Kas Harian”, “Tabel Realisasi Anggaran vs Rencana”, dan “Laporan Bulanan Bidang”. Dengan

pengelolaan keuangan sederhana yang tertib, Pokdarwis dapat menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan peluang kemitraan.

7.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola keuangan dan administrasi organisasi masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan informasi—anggaran, realisasi dana, sumber dana, penggunaan barang/jasa tersedia untuk anggota dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban—organisasi menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan sumber daya kepada anggota, masyarakat dan mitra. Sebagai penelitian menunjukkan, dalam pengelolaan dana desa, “transparency, accountability and community participation” memiliki efek langsung terhadap pengelolaan keuangan yang efektif.

Dalam konteks Pokdarwis, transparansi dan akuntabilitas bisa diwujudkan dengan cara:

1. Memublikasikan laporan keuangan tahunan kepada anggota dan masyarakat—misalnya melalui papan pengumuman desa atau grup WhatsApp.
2. Menyelenggarakan rapat anggota terbuka dimana Bendahara melaporkan keuangan, Ketua memaparkan kegiatan, anggota bisa bertanya atau memberi masukan.
3. Audit internal sederhana (misalnya pembentukan tim pengawas anggota) atau audit eksternal jika ada dana hibah besar.
4. Penggunaan media komunikasi publik (brosur, website, media sosial) untuk menunjukkan penggunaan dana dan hasil kegiatan—ini meningkatkan kepercayaan mitra dan masyarakat.

Penelitian “Tourism and Financial Transparency: The Role of Sustainability Reporting in Shaping the Future of Tourism” menegaskan bahwa transparansi keuangan di sektor pariwisata kini menjadi salah satu aspek penting bagi reputasi dan keberlanjutan destinasi.

Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, Pokdarwis tidak hanya memenuhi kewajiban moral tetapi juga memposisikan diri sebagai organisasi terpercaya yang dapat menarik modal, kerjasama, dan dukungan berkelanjutan.

7.5 Pelaporan Kegiatan Pokdarwis

Pelaporan kegiatan adalah rangkaian akhir dari siklus administrasi dan keuangan organisasi—yang menjembatani antara pelaksanaan dan evaluasi. Pelaporan ini harus mencakup aspek kegiatan (apa yang dilakukan, kapan, siapa), keuangan (dana diterima, pengeluaran, saldo), dampak (jumlah peserta, kunjungan, pendapatan masyarakat), dan rekomendasi perbaikan. Beberapa jenis laporan yang diperlukan dalam Pokdarwis:

- Laporan triwulan bidang: tiap bidang menyampaikan progres terhadap indikator, kendala, rencana berikutnya.
- Laporan tahunan organisasi: buku laporan lengkap yang mencakup ringkasan kegiatan, keuangan, evaluasi, serta rencana tahun depan.
- Laporan kepada mitra / pemerintah: jika Pokdarwis menerima dana atau kerjasama resmi, maka harus menyampaikan laporan sesuai ketentuan mitra atau regulasi.
- Laporan publik / komunitas: ringkasan yang dapat dipahami masyarakat luas (tidak teknis) yang menunjukkan bagaimana kegiatan Pokdarwis mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata lokal.

Dalam praktik, laporan yang baik akan memuat grafik, tabel realisasi anggaran, foto kegiatan, testimoni anggota atau wisatawan, dan kolom “pelajaran yang dipetik”. Laporan semacam ini tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban tetapi juga alat promosi dan pembelajaran internal.

Penelitian “Motivation and Accountability Behavior of Tourism Village Managers in the Implementation of Tourism Village Financial Management” menunjukkan bahwa motivasi pengurus dan perilaku akuntabilitas berpengaruh kuat terhadap kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan organisasi pariwisata desa.

Modul ini akan menyediakan template laporan sederhana—misalnya “Form Ringkasan Kegiatan Tahunan”, “Tabel Realisasi Anggaran dan Indikator Kinerja”, dan “Form Umpan Balik Anggota/Masyarakat”. Disarankan agar laporan tahunan diluncurkan dalam acara rapat anggota atau kegiatan komunitas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Penutup

Bab ini telah membahas secara komprehensif tata administrasi dan keuangan dalam organisasi masyarakat, khususnya dalam konteks Pokdarwis: mulai dari prinsip administrasi organisasi, pencatatan dan dokumentasi kegiatan, manajemen keuangan sederhana, transparansi dan akuntabilitas, hingga pelaporan kegiatan. Dengan penerapan yang baik, Pokdarwis dapat menjalankan fungsi kelembagaannya tidak hanya secara formal tetapi operasional, tertib, dan dipercaya oleh anggota, masyarakat, dan mitra. Selanjutnya, peserta pelatihan didorong untuk membuat “paket administrasi dan keuangan” sendiri: template pencatatan, format laporan, jadwal pelaporan dan mekanisme audit internal agar modul ini langsung dapat diimplementasikan.

Referensi

- Baihaqi, et al. (2023). *The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation*. *Perspektif Akuntansi*, 6(1):15-36. PDF tersedia. (
- Susenayanie, D. (2023). *Motivation and Accountability Behavior of Tourism Village Managers in the Implementation of Tourism Village Financial Management*. PDF tersedia.
- Bahar, A. (2018). *Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu*. *Jurnal Profitability*, 2(1). PDF tersedia.
- Sam, AAR. (2024). *Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money in Public Sector Financial Management*. *IJERFA*. PDF available.
- Nisa, AL. (2025). *Peran Administrasi dalam Mendukung Operasional Harian Organisasi*. PDF tersedia.
- Adnan, H. I. M. & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. PDF tersedia.

BAB VIII – PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN

8.1 Pentingnya Networking bagi Pokdarwis

Jejaring (networking) merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan organisasi berbasis masyarakat seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Jejaring yang kuat memungkinkan Pokdarwis untuk memperoleh akses ke sumber daya yang lebih luas — baik sumber daya manusia, modal, teknologi, pasar, maupun kemitraan strategis. Sebagaimana penelitian menunjukkan bahwa “tourism development is influenced by ... personal social networks” dalam komunitas wisata di Indonesia.

Ketika Pokdarwis memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, serta komunitas lain, maka peluang untuk: mendapatkan pelatihan, akses pasar, promosi bersama, bantuan teknis dan fasilitas, serta dukungan kebijakan meningkat. Sebaliknya, Pokdarwis yang “terisolasi” tanpa jejaring akan menghadapi keterbatasan besar — produk wisata sulit dikenal, sumber dana terbatas, inovasi minim, dan sulit berkolaborasi. Networking juga memperkuat modal sosial (social capital) dalam komunitas wisata. Menurut Suri dkk. (2024) dalam kajian tentang social capital dan networking dalam pengembangan pariwisata Indonesia: “Building social capital based on social interaction through social networks can significantly influence the development of an organization, including tourist attractions.”

Dalam konteks Pokdarwis di desa/kelurahan, pentingnya jaringan bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Akses ke pasar wisatawan: melalui jaringan dengan agen perjalanan, platform digital, komunitas wisata.
2. Akses ke modal dan dukungan: melalui jaringan dengan pemerintah, lembaga donor, swasta CSR, perguruan tinggi.
3. Pembelajaran dan inovasi: jaringan dengan akademisi atau komunitas nasional/internasional membuka ide baru, teknologi, model bisnis baru.
4. Legitimasi dan reputasi: sebuah Pokdarwis yang dikenal memiliki mitra dan jejaring akan lebih dipercaya oleh wisatawan, investor, dan lembaga pendukung.

Oleh karena itu, modul ini menekankan bahwa salah satu aktivitas awal bagi Pokdarwis adalah melakukan pemetaan jaringan yang sudah ada (misalnya perangkat desa, Karang Taruna, Dinpar, perguruan tinggi, pelaku usaha lokal) dan merancang strategi memperluas jejaring baik horizontal maupun vertikal.

8.2 Strategi Menjalin Kemitraan (Pemerintah, Swasta, Akademisi, Komunitas)

Setelah memahami pentingnya jejaring, Pokdarwis perlu memiliki strategi konkret untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Empat kelompok utama adalah: Pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa), Swasta (pelaku usaha wisata, UMKM, investor), Akademisi/Peneliti (universitas, institut riset) dan Komunitas (komunitas lokal, organisasi masyarakat, NGO).

Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

1. Identifikasi mitra strategis: Pilih mitra yang saling menguntungkan. Misalnya dinas pariwisata untuk promosi; hotel/resort sebagai kanal layanan wisata; universitas untuk pendampingan riset dan pelatihan; komunitas lokal untuk kolaborasi produk budaya.
2. Membangun proposisi nilai (value proposition): Kemitraan harus menawarkan manfaat nyata bagi mitra — misalnya Pokdarwis menawarkan akses ke atraksi lokal, komunitas, produk kerajinan; mitra menawarkan pemasaran, pelatihan, modal.
3. Pendekatan kolaboratif, bukan top-down: Kemitraan yang baik bersifat dialogis, bukan hanya Pokdarwis yang menerima instruksi. Studi “Community-Private Partnership (CPP) in Community Based Tourism Management: Case Study of Blangsinga Village, Bali” menunjukkan bahwa kemitraan swasta-komunitas yang tidak mengurangi kepemilikan komunitas dapat berhasil.
4. Kontrak kerjasama yang jelas: Sebelum kerjasama dijalankan, buat kesepakatan tertulis (MoU atau perjanjian) yang mencakup peran, tanggung-jawab, pembagian hasil, durasi, mekanisme evaluasi. (Akan dibahas di subbab 8.4).
5. Pemeliharaan hubungan jangka panjang: Kemitraan bukan proyek satu kali—melainkan harus dirawat. Komunikasi rutin, evaluasi bersama, banyak kegiatan kolaborasi akan memperkuat kepercayaan.

Sebagai bukti empiris, riset “Tourism Industry Partnerships: Partnership Opportunities for MSMEs and Large Business in Palembang City” menunjukkan bahwa kemitraan antara UMKM dan bisnis besar dalam sektor pariwisata memerlukan pelatihan, modal, inovasi produk dan jaringan pasar.

Bagi Pokdarwis modul ini merekomendasikan agar dalam pelatihan peserta melakukan workshop pemetaan calon mitra, menyusun daftar 5-10 mitra paling relevan, dan menyusun langkah pendekatan spesifik (surat, kunjungan, kolaborasi acara, pilot project) dalam 6-12 bulan ke depan.

8.3 Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Industri Pariwisata

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri pariwisata merupakan bentuk kemitraan yang sangat strategis bagi Pokdarwis. Perguruan tinggi dapat menyediakan: riset, pelatihan, pengabdian masyarakat, pengembangan produk, evaluasi kelembagaan; sementara industri pariwisata (hotel, agen perjalanan, platform digital, event organizer, UMKM tourism) menyediakan akses pasar, teknologi, branding, pemasaran, investasi. Dalam penelitian “Digitalization, Branding, and Networking Collaboration: Small and Medium-Sized Tourism Enterprises” ditemukan bahwa kolaborasi dan jaringan bagi SMTEs sangat penting dalam menghadapi era digital dan adaptasi pasar.

Beberapa langkah praktis kolaborasi antara Pokdarwis dengan perguruan tinggi/industri:

Menandatangani MoU kerjasama riset, mahasiswa magang, dosen pendamping, kegiatan praktikum di desa wisata.

Mengadakan program bersama seperti: workshop pengembangan atraksi, desain produk kerajinan/souvenir, pelatihan digital marketing untuk wisata.

Kemitraan industri: hotel/resort menerima kunjungan Pokdarwis sebagai bagian dari paket wisata, atau menawarkan kanal promosi; UMKM wisata bekerja sama dengan platform e-commerce dari industri. Joint event: festival budaya, pameran wisata, road-show ke kota besar, yang melibatkan Pokdarwis, kampus dan pelaku industri.

Contoh kasus empiris: studi di Balegona (Nepal) – “Community Collaboration with Tourism Stakeholders: Issues and Challenges” menunjukkan bahwa kolaborasi lintas stakeholder (termasuk akademisi) sangat penting dalam pembangunan wisata komunitas yang berkelanjutan.

Dalam modul, latihan disiapkan: peserta menyusun skema kolaborasi 3-5 tahun antara Pokdarwis dengan universitas (misalnya Politeknik Negeri Lampung) dan industri lokal (hotel, platform digital wisata, UMKM kerajinan) dengan output konkret (misalnya riset produk, pelatihan bersama, promosi digital).

8.4 Penyusunan MoU dan Kesepakatan Kerjasama

MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerjasama menjadi dokumen formal yang menegaskan niat baik, ruang lingkup, tanggung jawab, durasi, mekanisme evaluasi antara Pokdarwis dan mitra. Dokumen ini sangat penting agar kemitraan berjalan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa komponen penting dalam MoU kerjasama:

1. Identifikasi pihak yang terlibat (nama organisasi, alamat, perwakilan).
2. Ruang lingkup kerjasama: apa saja yang dilakukan (pelatihan, pemasaran, riset, produksi).
3. Tugas dan tanggung-jawab masing-masing pihak.
4. Sumber daya yang disediakan (waktu, dana, fasilitas, teknologi).
5. Pembagian manfaat atau hasil (misalnya pendapatan dari produk wisata, branding, pemasaran).
6. Durasi kerjasama dan mekanisme perpanjangan atau pengakhiran.
7. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan laporan bersama.

Perselisihan & force majeure: bagaimana apabila ada konflik, perubahan kondisi eksternal. Dalam praktiknya, MoU tidak harus rumit—justru semakin sederhana dan jelas semakin baik untuk komunitas desa wisata yang mungkin belum terbiasa dengan dokumen legal. Namun penting bahwa MoU dicetak di kertas resmi, ditandatangani pihak berwenang, dan disimpan sebagai arsip Pokdarwis.

Sebagai contoh instruktif, riset “The Development of Community-Based Tourism Through Partnership Support” menyebut bahwa kemitraan antara pemerintah, industri kreatif, dan komunitas di kawasan Tanjung Lesung berhasil karena ada struktur formal kerjasama dan

peran jelas mitra. Modul ini menyarankan agar peserta disediakan template MoU sederhana (dua halaman) yang bisa diisi Pokdarwis dan mitra: ruang lingkup, tugas, sumber daya, durasi, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi.

8.5 Contoh Kasus: Pokdarwis Berjejaring dengan Dunia Usaha

Agar pembaca dapat memahami secara nyata, berikut dua contoh kasus nyata yang relevan:
Contoh Kasus 1 – Desa Wisata Keranggan, Banten

Penelitian oleh Pramono dkk. (2022) menunjukkan bahwa di Desa Wisata Keranggan, Pokdarwis berhasil mengembangkan jaringan kemitraan dengan komunitas, pemerintah daerah, pelaku wisata, dan platform pemasaran digital. Kerjasama tersebut membawa peningkatan akses pasar, diversifikasi produk wisata, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Contoh Kasus 2 – Desa Wisata Blangsinga, Bali
Penelitian oleh Sawitri & Suryanatha Prabawa (2022) menyoroti kemitraan “Community-Private Partnership (CPP)” antara komunitas desa dan investor swasta dalam pengembangan CBT (Community-Based Tourism). Hasil studi menunjukkan bahwa kemitraan swasta-komunitas dapat berlangsung tanpa mengorbankan kepemilikan komunitas atas wisata tersebut, asalkan peran dan pembagian manfaat diatur dengan jelas.

Dari kedua kasus tersebut dapat diambil pelajaran:

1. Jejaring dan kemitraan harus berbasis *kepercayaan, kejelasan pembagian manfaat, peran yang saling melengkapi*.
2. Industri atau swasta bukan hanya ‘partner dana’ tetapi juga partner pengembangan kapasitas, akses pasar dan branding.
3. Perguruan tinggi atau akademisi dapat berfungsi sebagai jembatan riset, inovasi produk, pelatihan, dan evaluasi kualitas.
4. Dokumentasi formal (MoU, laporan bersama, monitoring) penting untuk menjaga kontinuitas kemitraan dan mencegah konflik monitor-moral.
5. Kemitraan yang baik memberi manfaat nyata kepada masyarakat lokal—peningkatan pendapatan, partisipasi masyarakat, pelestarian budaya/lingkungan—bukan sekadar branding.

Penutup

Bab ini telah menguraikan pentingnya jejaring dan kemitraan sebagai elemen strategis bagi Pokdarwis dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat: dari pentingnya networking, strategi menjalin kemitraan, kolaborasi khusus dengan perguruan tinggi dan industri, penyusunan MoU/kerjasama formal, hingga studi kasus nyata di Indonesia. Dengan pengembangan jejaring dan kemitraan yang tepat, Pokdarwis bukan hanya dapat bertahan, tetapi tumbuh, inovatif, dan mampu bersaing dalam ekosistem pariwisata yang dinamis. Selanjutnya, peserta pelatihan diharapkan melakukan *aktivitas pemetaan mitra* dan *penyusunan draft MoU* sebagai bagian dari latihan praktis.

Referensi

- Suri, D. M. (2024). *Building bonds for sustainable growth: social capital and networking in Indonesian tourism development*. PDF tersedia.
- Hulu, M., Brian, R., Pratiyudha, D., Sihombing, D. & Kusumo, E. (2021). *Tourism Industry Partnerships: Partnership Opportunities for MSMEs and Large Business in Palembang City*. PDF tersedia.
- Sawitri, I. M. Y. & Suryanatha P. (2022). *Community-Private Partnership (CPP) in Community Based Tourism Management: Case Study of Blangsinga Village, Bali*. PDF tersedia.
- Wardhani, W. N. R. (2023). *Digitalization, Branding, and Networking Collaboration: Small and Medium-Sized Tourism Enterprises*. PDF/HTML tersedia.
- Bhatta, K. D. & Joshi, B. R. (2023). *Community Collaboration with Tourism Stakeholders: Issues and Challenges to Promote Sustainable Community Development in Annapurna Sanctuary Trail, Nepal*. PDF available.
- Pramono, R., dkk. (2022). *Community-based tourism potential in south Tangerang village*. PDF tersedia.

BAB IX – PEMBERDAYAAN ANGGOTA DAN PELATIHAN BERKELANJUTAN

9.1 Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama bagi keberhasilan kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Tanpa SDM yang cukup kompeten, baik dalam pengelolaan ide, pelaksanaan program maupun evaluasi, maka pokdarwis cenderung berjalan secara ad-hoc dan kurang berdampak. Studi “Capacity Building for Community; The Case Study in Cam Kim, Hoi An rural area” menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pemberdayaan komunitas melalui metode partisipatif dengan alat seperti SWOT dan seni komunitas meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mengelola pariwisata komunitas.

Peningkatan kapasitas SDM dalam konteks Pokdarwis meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Keterampilan teknis: misalnya pemandu wisata, pelayanan, promosi digital, pengelolaan homestay, penggunaan media sosial.
2. Keterampilan manajerial: seperti perencanaan kerja, pengorganisasian, administrasi, keuangan sederhana, pelaporan.
3. Keterampilan sosial dan partisipatif: fasilitasi kelompok, komunikasi, resolusi konflik, motivasi anggota.
4. Keterampilan inovasi dan adaptasi: merespon tren wisata, teknologi digital, praktik pariwisata berkelanjutan.

Menurut kajian “Developing factors capacity building: for the tourism industry” ditemukan bahwa faktor-kunci untuk kapasitas building adalah komitmen komunitas, pelatihan yang relevan, dukungan institusi, dan jejaring yang terbuka. Untuk Pokdarwis di tingkat desa, modul ini merekomendasikan agar agenda pelatihan dilakukan minimal satu tahun sekali, dengan kombinasi teori dan praktik lapangan, serta dilengkapi dengan mentoring oleh pihak kampus atau dinas pariwisata. Contoh aktivitas: workshop “Pelayanan Wisata Ramah Lingkungan”, pelatihan “Keuangan Sederhana bagi Pokdarwis”, dan lokakarya “Promosi Digital Desa Wisata”.

9.2 Strategi Penguatan Kompetensi dan Motivasi Anggota

Meningkatkan kompetensi anggota saja tidak cukup tanpa menumbuhkan motivasi yang berkelanjutan. Kompetensi tanpa motivasi dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dan keaktifan anggota. Oleh karena itu, strategi penguatan keduanya perlu dirancang secara sinergis.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pokdarwis:

1. Pelatihan berbasis kebutuhan dan konteks lokal: Sebelum pelatihan dilakukan, lakukan analisis kebutuhan (needs assessment) terhadap anggota—misalnya tingkat literasi digital, pengalaman wisata, kemampuan bahasa asing. Dengan demikian materi pelatihan relevan dan langsung aplikatif.
2. Sistem penghargaan dan pengakuan: Penghargaan sederhana seperti ‘Anggota Teladan Bulanan’, sertifikat kompetensi, atau publikasi profil anggota di media sosial desa dapat meningkatkan rasa bangga dan tanggungjawab anggota.
3. Keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran: Metode aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, role-play dan proyek mini membuat anggota “belajar sambil melakukan”, bukan hanya mendengarkan. Hal ini akan memperkuat pembelajaran dan motivasi.
4. Mentoring dan pendampingan berkelanjutan: Setelah pelatihan formal, penting dilakukan pendampingan oleh pengurus senior, kampus, atau lembaga mitra selama 3-6 bulan untuk memastikan transfer kompetensi dan implementasi di lapangan.
5. Pengembangan jalur karier atau tanggungjawab: Anggota yang telah kompeten bisa diberikan kesempatan untuk memimpin bidang baru, atau menjadi trainer internal—ini memotivasi anggota lain untuk mengupgrade kompetensi.

Riset “A Case Study of Cimande Village” menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata adalah pengetahuan kewirausahaan yang terbatas dan kurangnya pemasaran digital. Dengan demikian, kombinasi kompetensi teknis + motivasi + pendampingan menjadi besi tajam bagi keberhasilan Pokdarwis.

9.3 Sistem Regenerasi Kepengurusan

Kepemimpinan dan pengurus Pokdarwis tidak boleh stagnan: regenerasi kepengurusan sangat penting untuk memastikan organisasi tetap dinamis, segar dengan ide baru, dan menghindari kelelahan atau dominasi satu pihak. Sistem regenerasi mencakup: masa jabatan yang jelas, mekanisme pemilihan atau pergantian, pelatihan penerus, dan dokumentasi penyerahan tugas

(handover).

Beberapa prinsip dalam sistem regenerasi yang baik:

1. Tetapkan masa jabatan (misalnya 2 atau 3 tahun) untuk Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara dan bidang-bidang.
2. Buat prosedur pemilihan yang transparan: misalnya rapat anggota, surat suara atau musyawarah bersama.
3. Siapkan pelatihan khusus bagi calon pengurus muda melalui mentoring atau “shadowing” pengurus lama.
4. Dokumentasikan proses transisi: laporan akhir pengurus lama, pelaporan kegiatan terbuka, penyusunan rencana kerja oleh pengurus baru dengan pendampingan.

Dalam literatur pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, sistem regenerasi ini sering menjadi titik lemah—organisasi menjadi stagnan karena kepengurusan lama terus berlalu tanpa inovasi atau perbaikan. Sebagai contoh, kajian “Community capacity building: an emerging challenge for tourism” menyebut bahwa kekurangan regenerasi merupakan hambatan bagi keberlanjutan kapasitas komunitas.

Oleh karena itu, modul ini merekomendasikan agar Pokdarwis membuat dokumen “Kebijakan Regenerasi” yang memuat prosedur, jadwal pergantian, kriteria calon pengurus, dan rencana pelatihan penerus.

9.4 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pokdarwis

Pelatihan formal atau informal menjadi mekanisme utama dalam peningkatan kapasitas SDM dan anggota Pokdarwis. Lebih lanjut, apabila memungkinkan, sertifikasi kompetensi dapat memberikan pengakuan resmi, meningkatkan kredibilitas Pokdarwis di mata mitra dan wisatawan serta memperkuat motivasi anggota.

Pelatihan yang relevan bagi Pokdarwis meliputi:

1. Pelatihan pemandu wisata lokal (local tour guiding)
2. Pelatihan pelayanan homestay & hospitality
3. Pelatihan pemasaran digital dan e-commerce wisata

4. Pelatihan manajemen organisasi dan keuangan sederhana
5. Pelatihan pelestarian budaya & lingkungan wisata

Dalam penelitian “Community-based tourism transformation: What Does The Local ...” disebutkan bahwa komunitas lokal perlu dilengkapi dengan kapasitas agar bisa bersaing pasca-krisis seperti pandemi; pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi salah satu elemen kunci.

Sertifikasi dapat diusahakan melalui kerjasama mitra akademik atau lembaga sertifikasi pariwisata (jika tersedia). Misalnya, kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan “Sertifikat Pelatihan Pemandu Wisata” kepada anggota Pokdarwis. Modul ini menyarankan agar setiap anggota baru Pokdarwis diwajibkan mengikuti pelatihan ini dalam 6 bulan pertama keanggotaan, dan setiap tahun dilaksanakan refresher training bagi pengurus.

9.5 Model Pembelajaran Partisipatif di Masyarakat

Model pembelajaran partisipatif sangat cocok untuk organisasi masyarakat seperti Pokdarwis karena menekankan kolaborasi, pengalaman langsung, dan kontribusi anggota sebagai subjek pembelajaran — bukan hanya objek. Metode-metode seperti diskusi kelompok, simulasi lapangan, studi kasus lokal, role-play, mentoring peer, dan refleksi kelompok sangat direkomendasikan.

Contoh: metode “World Café” untuk membahas tantangan pengembangan produk wisata; metode “Action Learning” untuk proyek mini anggota; pendekatan “Peer Coaching” antar pengurus lama-baru; dan model “Learning by Doing” seperti kunjungan belajar ke desa wisata sukses.

Dalam penelitian “Implementation of Participatory Community Tourism Development Model” di Indonesia ditemukan bahwa pendekatan partisipatif (PRA + workshop + dialog) meningkatkan keterlibatan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Selain itu, literatur “Developing Concept and Strategy for Creative Tourism” (Yogyakarta) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kreatif dan context-based membuat peserta pelatihan lebih siap menghadapi realitas lapangan.

Dalam modul ini, tiap sesi pelatihan akan menyertakan kegiatan partisipatif—misalnya peserta melakukan mapping potensi wisata desa mereka, menyusun rencana mini,

mempresentasikannya, kemudian saling memberi umpan-baik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi bermakna dan segera dapat diterapkan.

Penutup: Dengan model pembelajaran partisipatif yang baik, anggota Pokdarwis tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga mengalami proses pembelajaran nyata, meningkatkan rasa kepemilikan, dan mampu menjadi pelaku aktif dalam organisasi.

Penutup

Bab ini telah membahas secara mendalam bagaimana Pokdarwis dapat memberdayakan anggotanya secara sistematis: peningkatan kapasitas SDM, penguatan kompetensi dan motivasi anggota, sistem regenerasi kepengurusan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta model pembelajaran partisipatif di masyarakat. Pemberdayaan anggota dan pelatihan berkelanjutan menjadi pijakan penting agar Pokdarwis tidak hanya sebagai kelompok formal tetapi menjadi lembaga yang hidup, berkembang, dan berdaya saing. Selanjutnya, peserta pelatihan diarahkan untuk menyusun rencana pelatihan tahunan bagi Pokdarwis mereka, memilih 35 topik pelatihan prioritas, menetapkan jadwal, instruktur, dan sistem evaluasi.

Referensi Pilihan

- Soedarwo, V. S. D., Ramadhani Fuadiputra, I., Bustami, M. R., & Jha, G. K. (2022). *Participatory Action Research (PAR) Model for Developing A Tourism Village in Indonesia*. Journal of Local Government Issues (LOGOS), 5(2), 193-206.
- Nisa, KNA. (2023). *Community Participation Analysis in Community-Based Tourism*. Journal of Tourism Sciences.
- Developing capacity building for the tourism industry. (n.d.). AIJMS.
- Community-based tourism: A catalyst for achieving the United Nations Sustainable Development Goals. MDPI.
- Community Participation in Indonesian Sustainable Tourism. PSSJ.
- A Case Study of Cimande Village – Tourism Research Journal.

BAB X – POKDARWIS DALAM PERSPEKTIF PARIWISATA BERKELANJUTAN

10.1 Konsep Pariwisata Berkelanjutan dan Community-Based Tourism

Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam pengembangan destinasi wisata yang memperhatikan keseimbangan antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial dan lingkungan (people-profit-planet). Konsep ini menekankan bahwa wisatawan, masyarakat lokal, dan lingkungan harus memperoleh manfaat secara adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan generasi masa depan. Dalam konteks Indonesia, pengembangan wisata berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) menjadi strategi penting untuk mencapai tujuan tersebut karena melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan, kepemilikan dan manfaat wisata. Sebagai ilustrasi, sebuah studi dengan fokus pada desa wisata Indonesia menyimpulkan bahwa “the role of community-based tourism in sustainable tourism village in Indonesia” dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan apabila didukung oleh modal sosial dan komitmen pemangku kepentingan. Lebih jauh, platform literatur menyebutkan bahwa CBT memperkuat kapasitas lokal untuk menjadi tuan rumah sekaligus pengelola destinasi wisata, dan dapat mengurangi ketergantungan pada investor besar yang sering mengabaikan aspek sosial & budaya.

Modul ini akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana Pokdarwis sebagai wadah masyarakat dapat mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan: mulai dari visi misi yang menyertakan konservasi alam, keterlibatan anggota masyarakat dalam keputusan, hingga mekanisme distribusi manfaat yang adil. Kami akan membahas juga hambatan-hambatan klasik seperti over-tourism, eksklusivitas, dan degradasi lingkungan, serta bagaimana Pokdarwis dapat berperan mengatasinya.

10.2 Peran Pokdarwis dalam Pelestarian Alam dan Budaya

Keberadaan Pokdarwis memiliki potensi besar dalam pelestarian alam dan budaya lokal karena mereka berada di garis depan komunitas lokal dan memiliki legitimasi internal. Peran ini mencakup:

1. Identifikasi dan pemeliharaan aset alam dan budaya lokal—misalnya tradisi adat, ekosistem alam, kerajinan lokal.

2. Membina kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan destinasi: misalnya pengelolaan sampah wisata, konservasi mangrove/pulau, penerapan Sapta Pesona.
3. Mengintegrasikan budaya lokal ke dalam produk wisata—misalnya paket tur kerajinan budaya, pertunjukan ritual, sentra kuliner lokal—sehingga wisata bukan hanya konsumsi visual tapi juga pengalaman budaya.

Sebuah studi kasus di desa wisata ecotourism menunjukkan bahwa walau CBT menguntungkan secara ekonomi, tetapi bila aspek distribusi manfaat dan partisipasi lokal diabaikan maka dapat muncul konflik dan degradasi sosial. Dengan demikian, Pokdarwis harus menjalankan fungsi fasilitator antara masyarakat dan wisatawan, sekaligus pengelola destinasi yang menjaga keseimbangan antara penggunaan dan pelestarian. Modul ini akan memberikan langkah-praktis bagi Pokdarwis: misalnya menyusun kode etik destinasi, mekanisme partisipasi masyarakat dalam konservasi, dan monitoring dampak lingkungan serta budaya secara periodik.

10.3 Praktik Terbaik (Best Practices) Desa Wisata di Indonesia

Untuk memudahkan pemahaman oleh pembaca (masyarakat dan mahasiswa), sangat membantu untuk memaparkan beberapa *best practices* atau praktik unggulan di Indonesia yang menunjukkan Pokdarwis/CBT telah berjalan secara sukses. Contohnya:

1. Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta): penelitian menunjukkan keberhasilan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat dengan dukungan Pokdarwis dan masyarakat lokal.
2. Desa Wisata di Lombok kecil-pulau: studi tentang *community readiness* menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat sangat memengaruhi keberlanjutan wisata berbasis komunitas.
3. Desa Wisata di West Kalimantan: studi “Contribution of Community-Based Tourism to Household Income...” yang menunjukkan bagaimana CBT memberikan dampak nyata kepada rumah tangga lokal.

Dalam modul ini kita akan mengulas secara ringkas beberapa contoh tersebut: latar belakang, intervensi Pokdarwis, hasil yang dicapai (kuantitatif & kualitatif), faktor sukses dan

pembelajaran utama. Kemudian peserta pelatihan akan diarahkan untuk melakukan *benchmarking* terhadap Desa Wisata Poncowati (Lampung Tengah) sebagai studi kasus lokal.

10.4 Inovasi Digital dan Pemasaran Berbasis Komunitas

Era digital telah mengubah paradigma pemasaran wisata. Desa wisata dan Pokdarwis yang mampu memanfaatkan teknologi digital (media sosial, website, aplikasi, platform booking, konten video, influencer) akan memiliki keunggulan kompetitif. Sebagai contoh, penelitian “Digital Marketing and Sustainable Tourism for Tourist Villages in Bangli Regency, Bali” mendapati bahwa model pemasaran digital mendukung pariwisata berkelanjutan di desa wisata. Selain itu, riset “Tourism digital marketing in Indonesia: Current issues, challenges and opportunities” menunjukkan bahwa pelaku wisata di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam digital marketing seperti kapasitas SDM, infrastruktur teknologi dan konten kreatif.

Untuk Pokdarwis, modul ini akan menyajikan langkah-praktis:

1. Membangun website atau landing page desa wisata → konten cerita budaya, galeri foto, testimoni, paket wisata.
2. Memanfaatkan media sosial (Instagram, TikTok, YouTube) untuk memperkuat brand destination berbasis komunitas.
3. Integrasi sistem reservasi online atau kerjasama dengan OTA (Online Travel Agency) kecil lokal.
4. Pelatihan anggota untuk membuat konten digital (foto, video, live streaming) dan analisis data (insight media sosial).
5. Pelibatan komunitas lokal sebagai “content creator” untuk memberikan autentisitas dan membangun engagement.

Dengan inovasi digital, Pokdarwis dapat memperluas pasar, meningkatkan visibilitas, dan mengoptimalkan sumber daya lokal secara efisien.

10.5 Rencana Aksi Keberlanjutan Pokdarwis

Sebagai bab penutup, penting bagi Pokdarwis untuk menyusun Rencana Aksi Keberlanjutan (Sustainability Action Plan) yang memuat strategi jangka pendek (1 tahun), menengah (3 tahun) dan jangka panjang (5-10 tahun). Rencana aksi ini harus mencakup aspek: penguatan kelembagaan, pelatihan SDM, pemasaran digital, pelestarian alam & budaya, kemitraan strategis, monitoring & evaluasi.

Langkah-langkah praktis:

1. Menetapkan target spesifik: misalnya “Menurunkan limbah plastik destinasi sebesar 30% dalam 2 tahun”, “Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal sebesar 20% per tahun selama 3 tahun”, “Meluncurkan website dan booking online dalam 6 bulan”.
2. Menentukan indikator keberhasilan: jumlah anggota Pokdarwis aktif, jumlah kerjasama mitra, pendapatan masyarakat dari wisata, tingkat kepuasan wisatawan, indeks pelestarian lingkungan.
3. Alokasi tanggung jawab: menunjuk bidang atau tim khusus untuk masing-masing target.
4. Jadwal dan milestone: kuartal demi kuartal, aktivitas pelaksanaannya dan evaluasi rutin.
5. Sumber daya dan anggaran: mencantumkan sumber dana (iuran anggota, dana desa, hibah, mitra swasta), serta alokasi untuk setiap aktivitas.
6. Monitoring & evaluasi: persiapan dashboard atau laporan sederhana yang secara berkala menunjukkan realisasi vs target, pembelajaran dan rencana perbaikan.
7. Mekanisme pembaruan rencana: setiap tahun dilakukan review, dan rencana disesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal (tren wisata, regulasi, teknologi).

Melalui rencana aksi keberlanjutan, Pokdarwis tidak hanya menjalankan kegiatan sesaat tetapi membangun fondasi jangka panjang yang mampu menghadapi perubahan, menjaga relevansi dan terus memberikan manfaat bagi komunitas lokal.

Penutup

Bab ini telah menguraikan bagaimana Pokdarwis berposisi dalam kerangka pariwisata berkelanjutan: dari konsep dasar hingga praktik terbaik, dari pelestarian alam dan budaya hingga inovasi digital dan rencana keberlanjutan. Dengan pemahaman yang baik, anggota Pokdarwis, masyarakat dan mahasiswa diharapkan mampu melihat lebih dari sekadar “kelompok wisata” tetapi sebagai aktor pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Selanjutnya, modul akan mendorong peserta pelatihan melakukan latihan: menyusun draft rencana aksi keberlanjutan Pokdarwis di desa mereka sendiri.

Referensi

- Yamin, M., et al. (2024). *The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village in Indonesia*. Rev. Gest. Soc. Ambient., 18(7). PDF tersedia. ([ResearchGate](#))
- Iqbal, M. (2021). *Community-Based Ecotourism in Indonesia: Case Study in Nglanggeran Tourism Village*. Jurnal Good Governance, 17(1). PDF tersedia.
- Wibawa, I. P. A. (2022). *Digital Marketing and Sustainable Tourism for Tourist Villages in Bangli Regency, Bali, Indonesia*.
- Aliyah, K., Kisworo, B., Miraj, S., & Gupta, S. (2024). *The Effect of Digital Marketing Through Social Media and Tourism Attractiveness on Visitor Interest in Kandri Tourism Village*. JPPM, 11(1). PDF/HTML tersedia.
- Ginting, N., et al. (2023). *Community Participation in Sustainable Tourism: A Case Study in Balige, Indonesia*. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(23). PDF available.

LAMPIRAN

Lampiran ini berfungsi sebagai bagian pelengkap dari modul pelatihan “*Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Pokdarwis*”, yang bertujuan memberikan contoh praktis, format resmi, dan perangkat administratif yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan, masyarakat, maupun aparatur desa dalam mengelola kelembagaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Secara metodologis, penyusunan lampiran ini mengacu pada pedoman kelembagaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2020), serta merujuk pada hasil penelitian akademik tentang kelembagaan desa wisata dan penguatan administrasi organisasi berbasis masyarakat (Putra et al., 2022; Suri et al., 2024; Sawitri & Prabawa, 2022). Seluruh format disusun agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai elemen pokok tata kelola pariwisata berkelanjutan (*good tourism governance*).

1. **Formulir** Rencana Kerja Pokdarwis

Formulir Rencana Kerja (Workplan Form) disusun sebagai instrumen utama dalam perencanaan kegiatan tahunan Pokdarwis. Format ini memudahkan kelompok untuk menetapkan program prioritas, indikator kinerja, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan.

Menurut kajian Arintoko et al. (2020) dalam *GeoJournal of Tourism and Geosites*, keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada kemampuan komunitas menyusun rencana kerja yang terukur dan berkelanjutan, termasuk identifikasi potensi dan masalah yang ada.

Contoh format Formulir Rencana Kerja Pokdarwis:

No	Program/ Kegiatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Mitra Kerja	Indikator Keberhasilan	Sumber Dana
1	Pelatihan Pemandu Wisata	Meningkatkan kemampuan anggota Pokdarwis dalam pelayanan wisata	Maret 2025	Bidang Pendidikan & Pelatihan	Dinas Pariwisata, Polinela	20 peserta tersertifikasi	Dana Desa, CSR
2	Promosi Digital	Meningkatkan eksposur wisata di	Juli 2025	Bidang Humas & Kemitraan	Mahasiswa KKN,	10 k engagement	Swadaya/hibah

No	Program/ Kegiatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Mitra Kerja	Indikator Keberhasilan	Sumber Dana
	Desa Wisata	media sosial			Komunitas Konten		

Format ini juga disertai kolom “Catatan Evaluasi” yang dapat digunakan setelah kegiatan selesai. Menurut Suri et al. (2024), *capacity building and planning integration* melalui form rencana kerja terbukti meningkatkan efektivitas manajemen manajemen komunitas wisata di Indonesia.

2. Contoh SK Pembentukan Pokdarwis

Surat Keputusan (SK) Pembentukan Pokdarwis merupakan dokumen legal yang menegaskan pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan kelompok masyarakat penggerak pariwisata. SK ini juga menjadi dasar hukum bagi Pokdarwis untuk melakukan kemitraan, menerima bantuan, dan terlibat dalam program resmi pemerintah.

Berdasarkan Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Kemenparekraf, 2020), struktur SK minimal memuat:

1. Landasan hukum (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Permenparekraf No. 4 Tahun 2021).
2. Pertimbangan dan tujuan pembentukan Pokdarwis.
3. Susunan pengurus lengkap beserta masa jabatan.
4. Tugas dan fungsi Pokdarwis.
5. Ketentuan penutup mengenai masa berlaku dan tindak lanjut.

Contoh redaksi singkat SK:

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Desa Poncowati Nomor .../2025

Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Poncowati

Menimbang : bahwa untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Poncowati, perlu dibentuk Pokdarwis sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan promosi wisata.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; dan seterusnya.

Memutuskan : Membentuk Pokdarwis Desa Poncowati dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Penelitian Mulyadi & Siregar (2021) menegaskan bahwa keberadaan SK resmi meningkatkan legitimasi Pokdarwis di mata stakeholder, memperkuat jejaring antar-instansi, dan mempercepat akses pendanaan.

3. Template Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan dokumen pertanggungjawaban atas setiap aktivitas Pokdarwis. Laporan harus bersifat transparan, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Struktur umum laporan kegiatan:

1. Halaman judul dan identitas kegiatan.
2. Latar belakang kegiatan.
3. Tujuan dan manfaat.
4. Pelaksanaan kegiatan (waktu, tempat, peserta, pelaksana).
5. Hasil dan capaian (kuantitatif & kualitatif).
6. Evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut.
7. Dokumentasi foto dan tanda tangan penanggung jawab.

Menurut riset Fitriani et al. (2022), pelaporan kegiatan yang terstandar mendorong efisiensi organisasi komunitas karena memudahkan proses evaluasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah serta mitra eksternal.

Contoh format ringkas:

Elemen	Deskripsi
Nama Kegiatan	Pelatihan Pengelolaan Media Sosial Desa Wisata
Tujuan	Meningkatkan kemampuan anggota Pokdarwis dalam promosi digital

Elemen	Deskripsi
Waktu & Tempat	20–21 Maret 2025, Balai Desa Poncowati
Narasumber	Dosen Politeknik Negeri Lampung
Jumlah Peserta	25 orang
Hasil	Peserta memahami konsep content marketing dan mampu membuat akun resmi Pokdarwis
Evaluasi	Kegiatan berhasil meningkatkan engagement media sosial sebesar 40 % dalam 2 bulan
Rekomendasi	Perlu pelatihan lanjutan tentang video editing dan copywriting

Sebagaimana disarankan dalam studi Wardhani (2023), integrasi format pelaporan dengan sistem digital (Google Form atau Excel online) memudahkan rekap data dan transparansi hasil kegiatan.

4. Template Notulen Rapat

Notulen rapat berfungsi sebagai bukti tertulis setiap keputusan organisasi. Dokumen ini memastikan kesinambungan informasi antar-pengurus dan meminimalkan kesalahpahaman.

Format notulen yang disarankan:

NOTULEN RAPAT POKDARWIS DESA PONCOWATI

Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Tempat : Balai Desa Poncowati

Agenda : Rencana Pelaksanaan Festival Agrowisata

Peserta : Ketua, Wakil, Sekretaris, Bidang Humas, Pendidikan, dan Mitra Desa

Pembahasan:

1. Pembukaan oleh Ketua Pokdarwis.
2. Pemaparan rencana festival oleh Bidang Atraksi dan Produk Wisata.
3. Diskusi dan usulan dari anggota.
4. Kesimpulan keputusan.

Keputusan Rapat:

- Festival akan diselenggarakan pada 20–21 Juli 2025.
- Penanggung jawab: Bidang Humas dan Atraksi Wisata.
- Dana akan diajukan ke Dinas Pariwisata Lampung Tengah.

Penutup: Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Mengetahui,

Ketua Pokdarwis _____

Sekretaris _____

Riset oleh Sawitri & Prabawa (2022) menekankan pentingnya sistem dokumentasi rapat untuk menjamin kesinambungan kelembagaan dan *knowledge transfer* antar-generasi dalam komunitas wisata.

5. Daftar Pustaka (Referensi Buku, Jurnal, dan Regulasi Kemenparekraf)

Lampiran ini menyediakan rujukan yang menjadi landasan akademik dan praktis dalam penyusunan modul. Referensi dipilih berdasarkan keterkaitan dengan topik kelembagaan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan Pokdarwis.

A. Buku dan Regulasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2020). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Suwena, I.K. (2019). *Manajemen Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Pustaka Larasan.

B. Jurnal Nasional (SINTA 1–3)

Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). *Community-Based Tourism Village Development Strategies: A Case of Borobudur Tourism Village Area, Indonesia*. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398–413. [PDF access](#)

Wardhani, W. N. R. (2023). *Digitalization, Branding, and Networking Collaboration for Small and Medium-Sized Tourism Enterprises*. *Journal of Digital Marketing and Hospitality Innovation*, 4(1), 1–15. [PDF access](#)

Fitriani, A., et al. (2022). *Administrative Reporting Models for Community Organizations*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(2), 45–56.

C. Jurnal Internasional

Suri, D. M., et al. (2024). *Building Bonds for Sustainable Growth: Social Capital and Networking in Indonesian Tourism Development*. [PDF](#)

Sawitri, I. M. Y. & Suryanatha Prabawa, P. (2022). *Community-Private Partnership in Community-Based Tourism Management: Case Study of Blangsinga Village, Bali*. Widyapublika Journal, Universitas Ngurah Rai. [PDF link](#)

Yamin, M., et al. (2024). *The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village in Indonesia*. Revista de Gestión Social y Ambiental, 18(7). [Open PDF](#)

D. Website Referensi

<https://www.kemenparekraf.go.id> – Pedoman Resmi Pokdarwis dan Kebijakan Destinasi Berkelanjutan

<https://www.indonesia.travel> – Portal Desa Wisata dan Jejaring Pokdarwis Nasional

<https://repository.uir.ac.id> – Kumpulan Riset Pariwisata Berbasis Komunitas Indonesia

<https://researchgate.net> – Jurnal Internasional Akses Terbuka Terkait Manajemen Pariwisata